PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA ANTUTAN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

PUTRI ISMANIA MAWARNI
NPM. 202051015

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya

Nama	: Putri Ismania Mawarni
NPM	: 202051015
Program Studi	: Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DIDESA ANTUTAN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 21 Maret 2024

Yang menyatakan,

Putri Ismania Mawarni

NPM. 202051015

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL	:	**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DIDESA ANTUTAN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN**
DISUSUN OLEH	:	**PUTRI ISMANIA MAWARNI** **NPM. 202051015**

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Ketua/Penguji 1	Masrari, S. Sos., M.I.P. NIDN. 1114068601	1. .....
2. Sekretaris/Penguji 2	K. Rapisandi Isak Merang, M. Pd NIDN. 1104068802	2. .....
3. Pembimbing/Penguji 3	Syami, S. Sos., M.I.P NIDN. 1103108201	3. .....

Tanjung Selor, 01 April 2024

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Wilson Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Syaini, S. Sos., M.I.P selaku Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Masruri, S. Sos., M.I.P selaku Penguji 1 dan Bapak K. Rapiandi Isak Merang, M. Pd selaku Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua dan saudaraku tercinta;
8. Kepala Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 21 Maret 2024

Penulis

Putri Ismania Mawarni

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA ANTUTAN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN

Oleh :

Putri Ismania Mawarni
NPM. 202051015
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

ABSTRAK

Peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan sangat diperlukan. Kasus stunting yang ada di Desa Antutan tidak akan dapat diatasi apabila tanpa adanya peran dari pemerintah desa yang berupaya dalam penanganan stunting. Peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting meliputi menetapkan skala prioritas dan alokasi pendanaan terkiat pencegegahan stunting, mengoptimalkan peran kelembagaan desa, memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif kepada lembaga desa, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan koordinasi bersama tim teknis pencegahan stunting kabupaten, daerah maupun pusat kesehatan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan. Peran yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam penanganan stunting bertujuan untuk mengurangi angka stunting yang ada didesa Antutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data meliputi data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting didesa Antutan sudah cukup baik dengan dibuktikan Pemerintah desa menjadikan pencegahan stunting sebagai skala pioritas dalam RPJMDES, mengoptimalkan lembaga desa dengan adanya penyuluhan kader, adanya insentif dan mobilitas pada kader kesehatan, melakukan sosialisasi kepada masarakat yaitu rembug stunting setahun sekali dan koordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Antutan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, adanya dukungan anggaran untuk menjalankan suatu kegiatan, sosialiasi kepada masyarakat, serta kerja sama antar lembaga desa dan pemerintah desa yang berupaya mengurangi angka stunting di Desa Antutan seperti adanya posyandu rutin, rembug stunting dan pembagian PMT.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Penanganan Stunting

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN EFFORTS TO HANDLE STUNTING IN ANTUTAN VILLAGE, TANJUNG PALAS DISTRICT, BULUNGAN DISTRICT

By :

Putri Ismania Mawarni
NPM. 202051015
State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University

ABSTRACT

The role of the village government in efforts to deal with stunting in Antutan Village is very necessary.. The role of the village government in efforts to handle stunting includes determining the priority scale and funding allocation regarding stunting prevention, optimizing the role of village institutions, providing mobilization support and providing incentives to village institutions, carrying out outreach to the community, coordinating with the district, regional and central stunting prevention technical teams. public health.

This research aims to find out and analyze the role of the village government in efforts to handle stunting in Antutan Village. The role played by the village government in handling stunting aims to reduce the number of stunting in Antutan village.

This research uses qualitative research with a descriptive approach, data collection techniques include observation, interviews and documentation, data sources include primary data and secondary data.

The results of this research showas evidenced by the village government making stunting prevention a priority scale in the RPJMDES, optimizing village institutions by providing cadre counseling, providing incentives and mobility for health cadres, conducting outreach to the community. namely a stunting discussion once a year and coordination with the Antutan Village Community Health Center and the Bulungan District Health Service, budget support to carry out an activity, outreach to the community, as well as cooperation between village institutions and the village government which seeks to reduce the number of stunting in Antutan Village as is routine posyandu, stunting discussion and distribution of PMT.

Keywords ***:*** *Role, Village Government, Handling Stunting*

RIWAYAT HIDUP

Putri Ismania Mawarni, lahir pada tanggal 12 Maret 2002 di Tanjung Selor, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan suami istri bernama Bapak Ismail Haris dan Ibu Masniah.

Pada tahun 2008 memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 001 Tanjung Selor dan selesai di tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di MAN Bulungan sampai dengan kelas XII semester pertama di tahun 2019, lalu berpindah sekolah di SMA Bulungan dan lulus di tahun 2020.

Pada pertengahan tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara. Selama berkuliah di Universitas Kaltara penulis mengikuti beberapa organisasi internal diantaranya yaitu, BEM FISIP UNIKALTAR dan GenBI Kaltara. Dengan mengikuti kegiatan organisasi tersebut saya merasa *softskill* saya meningkat dari awalnya yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak bisa menjadi bisa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

HALAMAN KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep 9
2.2. Penelitian Terdahulu 9
2.3. Kajian Teoritis 19
2.3.1. Definisi Peran 19
2.3.2. Pemerintah Desa 21
2.3.3. Definisi Penanganan 23
2.3.4. Definisi Stunting 26
2.3.5. Peran Pemerintah Desa 28
2.4. Kerangka Berfikir 30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
3.2. Jenis Penelitian 33
3.3. Data dan Sumber Data 33
3.4. Fokus Penelitian 35
3.5. Teknik Pengumpulan Data 35
3.6. Uji Validitas Data 36
3.7. Teknik Analisis Data 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
4.1.1. Sejaran Desa Antutan 40
4.1.2. Visi Dan Misi 41
4.1.3. Kondisi Desa Antutan 43
4.1.4. Demografi Desa Antutan 44
4.1.5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Antutan 47
4.1.6. Daftar Stunting Desa Antutan 48

4.2. Hasil Penelitian 50
4.2.1. Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Didesa Antutan 50
a. Menetapkan Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Dan Alokasi Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terkait Upaya Penanganan Stunting 51
b. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan Desa 54
c. Memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan Insentif kepada KPM 57
d. Melakukan Sosialisasi Terkkait Penaganan Stunting Kepada Masyarakat 59
e. Melakukan Koordinasi Terkait Pencegahan Stunting Kepada Tim Teknis Kabupaten, Daerah dan Puskesmas 63
4.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antutan 66
4.2.3. Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanganan Stunting di Desa Antutan . 73
4.3. Pembahasan 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 88
5.2. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA xii

LAMPIRAN..... xiv

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.	Penelitian Terdahulu	10
3.1.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	32
3.2.	Jumlah Informan.....	34
4.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	44
4.2.	Jumlah Kepala Keluarga per RT	44
4.3.	Tingkat Pendidikan.....	46
4.4.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	46
4.5.	Data Stunting Desa Antutan Tahun 2020.....	48
4.6.	Data Stunting Desa Antutan Tahun 2021.....	49
4.7.	Data Stunting Desa Antutan Tahun 2022.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	31
3.1.	Analisis Data Miles dan Huberman (Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D/Sugiyono)	
	Sumber : Sugiyono (2018).....	39
4.1.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Antutan.....	47
4.2.	Grafik Stunting Desa Antutan.....	50
4.3.	Pembinaan Kepada Kader Posyandu.....	56
4.4.	LPJ Penggunaan Dana Insentif Kader.....	59
4.5.	Rembug Stunting Desa Antutan.....	61
4.6.	Absensi Rembug Stunting Desa Antutan.....	62
4.7.	Kegiatan Posyandu Rutin.....	62
4.8.	Pembagian PMT LOKAL.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya mengenai infrastruktur tetapi juga mengenai pembangunan manusia. Pertumbuhan pribadi sama pentingnya dengan kemajuan fisik, pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan landasan budaya dan intelektualitas bangsa. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional diselenggarakan dalam rangka membangun manusia dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual, serta perbaikan pola asuh, ketersediaan makanan, dan rasa cukup dari pola makan merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembangunan manusia yang diperlukan untuk meningkatkan nilai sumber daya manusia.

Dalam peningkatan nilai sumber daya manusia memiliki tantangan yang kompleksitas seperti masalah stunting yang sekarang menjadi isu nasional, stunting menjadi isu nasional dikarenakan stunting ini sangat berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan juga berhubungan dengan tingkat kesehatan dan kematian anak. Saat ini Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan

ada banyaknya kasus gizi buruk pada anak balita. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis sehingga berdampak gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Akibatnya anak tumbuh lebih pendek dari anak normal lainnya, menurut WHO tinggi badan anak yang ideal pada usia 2-5 tahun dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti genetika, jenis kelamin dan pertumbuhan individu, rata-rata tinggi badan anak usia 2-5 tahun berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) untuk anak laki-laki dan perempuan. Usia 2 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 86 cm dan perempuan sekitar 85 cm, usia 3 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 94 cm dan perempuan sekitar 93 cm, usia 4 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 101 cm dan perempuan sekitar 100 cm, usia 5 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 108 cm dan perempuan sekitar 107 cm. Akibat dari masalah stunting ini juga berdampak pada perkembangan otak sehingga anak memiliki keterlambatan dalam berfikir.

Berdasarkan data UNICEF terdapat 7,8 juta anak yang menderita stunting, dan Indonesia masuk kedalam 5 besar Negara dengan jumlah anak yang mengalami stunting tinggi (UNICEF, 2007), riskesdas 2010, secara nasional prelevensi atau jumlah anak yang mengalami kependekan pada anak usia 2 sampai dengan 5 tahun di Indonesia.

Hal ini menyebabkan stunting menjadi isu nasional karena tingginya angka stunting, dengan itu maka stunting ini menjadi isu prioritas dalam

rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan adanya upaya penurunan stunting.

Data mengenai stunting ini ditemukan berasal dari desa, dikarenakan masih ada desa yang memegang adat istiadat setempat, stunting ini di akibatkan karena kekurangan gizi dari awal kehidupan dan penyebab lainnya dari stunting ini di akibatkan karena sosial budaya, masyarakat desa masih berpedoman pada kearifan lokal serta pada adat dan istiadat, seperti masih ada banyak nya pernikahan dini sehingga terdapat ibu hamil pada usia muda yang dimana kurangnya edukasi terkait asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan, kurang nya kematangan psikologis dan organ reproduksi serta pengetahuan tentang pola asuh yang benar, dari hal tersebut maka akan berdampak pada bayi, bayi akan kekurangan gizi dari awal kehidupannya. Dengan itu untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur pemerintah desa hendaknya meningkatkan peran nya sebagai aparatur desa yang tugas nya berhubungan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Desa yang berlaku.

Undang-Undang yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal, desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan.

Di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan untuk anak-anak agar mewujudkan kecerdasan dan meningkatkan pola pikir anak serta pelayanan kesehatan seperti posyandu untuk ibu hamil dan anak-anak usia 2-5 tahun agar nutrisi nya tercukupi sehingga terhindar dari masalah stunting, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.

Merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), saat ini angka prevalensi stunting di Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar 27,5 persen dan 2022 sebesar 22,1 persen, dengan hal ini mengalami penurunan sebesar 5,4 persen. Berdasarkan data operasi timbang oleh Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) jumlah stunting di Kabupaten Bulungan mencapai 889 bayi di berbagai tempat, dalam hal ini untuk mewujudkan upaya penurunan stunting di Kabupaten Bulungan maka Bupati Kabupaten Bulungan juga membuat suatu kebijakan mengenai pencegahan stunting

dalam Peraturan Bupati (PERBUP) No. 13 Tahun 2020 diubah dengan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Stunting yang tertuju pada tingkatan pemerintahan yang biasa dibagi pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Tingkat provinsi melalui koordinasi pencegahan stunting dilaksanakan setiap tiga bulan sekali menggunakan forum seperti Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tingkat Kabupaten/Kota memastikan pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM, anggaran, dukungan logistik serta kemitraan, tingkat Kecamatan melakukan pertemuan secara berkala untuk melakukan pemantauan kondisi stunting di tingkat desa sehingga dapat membangun perencanaan dan penyelenggaran program di tingkat Desa, Pemerintahan desa memainkan peranan yang penting karena dari desa data sasaran intervensi pencegahan stunting dikumpulkan, Kepala desa harus memastikan program tepat sasaran untuk memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa, seperti Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan desa melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) personil Kader Desa dari Kader Posyandu/Kader PAUD / Kader Kesehatan atau lainnya yang telah mendapatkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan

ditugaskan dalam upaya pencegahan stunting di desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait upaya pencegahan stunting kepada masyarakat, dan pemerintah desa dalam melaksanakan upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi dapat melakukan koordinasi bersama tim teknis pencegahan stunting kabupaten, perangkat daerah terkait, pusat kesehatan masyarakat dan lainnya.

Namun dalam menjalankan suatu peran bagi pemerintah desa dalam membuat suatu kebijakan dalam suatu permasalahan stunting di desa selalu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu kebijakan, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat, yaitu faktor pendukung meliputi kooordinasi dan kolaborasi pemerintah desa dan instansi yang terkait, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, serta aksesibilitas informasi dan edukasi kesehatan, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya kesehatan, serta tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pola makan dan gizi.

Desa yang terdampak masalah stunting salah satunya adalah Desa Antutan yang dimana angka stunting di Desa Antutan tahun 2020 mencapai 7 anak pada usia rata-rata 12 bulan – 29 bulan, 2021 mencapai 4 anak pada usia rata-rata 20 bulan – 29 bulan dan di tahun 2022 mencapai 4 anak pada usia 3 tahun – 4 tahun, maka dari itu perlunya meningkatkan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menjalankan suatu program untuk pengurangan jumlah anak stunting di desa dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membuat suatu kebijakan dari

permasalahan tersebut. Dari permasalahan di atas maka peneliti mengambil judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan ini adalah :

a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.
b. Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
b. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

1.4. Manfaat

a. Secara Teoristis

   Penelian ini diharapkan memberi gambaran terkait bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan

Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, dan apa faktor pendukung dan penghambatnya

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengetahuan dan referensi khususnya keluarga dan ibu hamil mengenai bagaimana memberikan asupan makanan yang baik agar menghindari terjadinya stunting pada anak-anak

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep

Pembatasan konsep digunakan untuk menghindar adanya suatu penyimpangan maupun perluasan pokok konsep agar penelitan ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ruang lingkup hanya meliputi peran Pemerintah Desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan meliputi mengoptimalkan peran kelembagaan desa, melaksanakan sosialisasi pencegahan stunting, serta melakukan koordinasi bersama tim teknis pencegahan stunting kabupaten, daerah dan pusat kesehatan masyarakat
b. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebatas pengetahuan penulis, pembahasan mengenai peran Pemerintah Desa dalam upaya penanganan stunting belum banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada jurusan

Administrasi Negara. Akan tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang penulis rasa sedikit banyaknya berhubungan dengan judul yang penulis angkat dan tentunya akan menjadi referensi dalam penyusunan skripsi penulis kedepannya, di antaranya adalah :

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
1	Nur Hasrat Illahi 2023 "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Stunting Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara"	Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan Stunting di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan stunting oleh Pemerintah Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, faktor pendukung dan penghambat penanganan stunting tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode	**Perbedaan** **a) Lokasi** Penelitian terdahulu: Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan **Persamaan** **a) Aspek yang diuji:** Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama - sama meneliti tentang peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting **b) Pendekatan Penelitian:**

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode: Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data, dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian bahwa penanganan stunting di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal.Kesimpulan: Hal tersebut terlihat dari program penanganan stunting yang ada di Desa Kontumere yang belum sepenuhnya	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		berjalan, dilihat masih adanya faktor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut antara lain kepercayaan dan adat setempat yang masih dipegang teguh sehingga mempengaruhi asupan gizi ibu hamil dan anak, banyaknya ibu hamil yang berada pada usia muda dengan tingkat pendidikan rendah dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sehingga kebersihan lingkungan terganggu. Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang lebih luas terkait penanganan stunting kepada seluruh masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, baik itu	

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		kader posyandu, kader pembangunan manusia dan bidan yang ada di desa tersebut agar terlaksananya program penanganan stunting secara optimal	
2	Eti Klasia Juliyanti 2022 "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan Belimbing Hulu" Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat"	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam penanggulangan kasus stunting yang terjadi di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Dalam pembangunan nasional, desa memegang strategi yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan indonesia. Indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang Kesehatan adalah dengan angka kelahiran atau kematian balita dan ibu hamil. Kasus seperti ini disebut	**Perbedaan** **a) Lokasi** Penelitian terdahulu Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan Belimbing Hulu sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan **b) Tahun Penelitian** Penelitian terdahulu meneliti mengenai objek terkait peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di tahun 2022 sedangkan penelitian ini dilaksanakan di tahun 2023 **c) Aspek yang diuji :** Penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		stunting. Dalam penelitian ini peneliti berfokus mengenai kebijakan pemerintah desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat dalam Penanggulangan stunting dengan berlandaskan pada prinsip good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti yaitu kebijakan pemerintah Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat dengan menggunakan subjek penelitian adalah Pemerintah Desa baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kasi Pemerintahan dan	meneliti mengenai kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting di desa, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di desa **Persamaan** **a) Pendekatan Penelitian:** Penelitian Terdahulu Dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif **b) Objek penelitian :** Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penanganan stunting di desa

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		yang berkepentingan lainnya, Kader Kesehatan, Tenaga Medis Bidan/Perawat, Warga Desa seperti Ibu Hamil / Balita Stunting, serta Penggerak Kaum Perempuan (PKK) yang ada di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan pemerintah desa Nanga Raya kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat dalam penanggulangan stunting masih belum jelas seperti pengalokasian dana anggaran terkait alat-alat yang digunakan oleh kader posyandu dalam pendeteksian stunting, keterbatasan fasilitas kesehatan seperti di Desa Nanga Raya hanya memiliki 2 pos kesehatan yaitu 1 Polindes yang terletak	

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		didusun Nanga Raya dan Poskesdes. Adanya kerjasama pihak pemerintah desa, tenaga kesehatan, pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting yang ada, serta dilakukan sosialisasi dari dinas kesehatan mengenai stunting. Kesadaran masyarakat terkait stunting sangat kurang seperti pengetahuan dan pencegahan stunting secara maksimal baik gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, balita dan pemenuhan kebutuhan gizi tersebut, hal ini disebabkan kurang nya sosialisasi dan pendampingan dari tenaga medis yang bertugas. Transaparansi pemerintah desa dalam pengalokasiaan dana desa dibidang kesehatan khususnya stunting sangat terbatas dan sulitnya memperoleh informasi terkait dana desa yang	

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		diperoleh dan digunakan setiap tahunnya dalam periode 5 tahun ini yaitu tahun 2017-2022 belakangan ini.	
3.	Trio Andika Hasyim 2023 **"**Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Menurut Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah)**"**	Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak lain seusianya. Asupan gizi dan nutrisi yang tak terpenuhi menjadi sebab utama terjadinya stunting. Peran pemerintah desa sangat di perlukan untuk mensosialisasikan pentingnya pencegahan stunting. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Jenis penelitian yang dipilih untuk jenis penelitian ini adalah (field research) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa	**Perbedaan** **a) Lokasi** Penelitian terdahulu: Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan **b) Aspek yang diteliti** Penelitian terdahulu meneliti peran pemerintah desa dalam penanganan stunting menurut Siyasah Tanfidziyah sedangkan penelitian ini hanya meneliti peram pemerintah desa dalam penanagana stunting. **Persamaan** **a) Aspek yang diuji :** Penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		memerlukan hipotesis, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. data primer diperoleh melalui interview terhadap informan yang mengetahui persoalan di penelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan, menunjukan bahwa Pemerintah Desa Tanggulangin telah menjalani perannya dengan cukup baik dalam hal penanggulangan stunting. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penanggulangan stunting yang dalam peraturan tersebut seperti melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan stunting dan pemberian gizi	dengan penelitian ini sama-sama meneliti peran pemerintah desa dalam penanganan stunting **b) Pendekatan Penelitian:** Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama–sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini
		dan nutrisi yang cukup. Peran pemerintah Desa Tanggulangin telah dijalankan sesuai dengan fitrahnya, dengan mementingkan kepentingan masyarakat dan melakukan perlindungan terhadap kesehatan warga desa. di dalam siyasah tanfidziyah pemerintah desa tanggulangin mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu kemaslahatan dan juga pemerintah Desa Tanggulangin harus melihat bagaimana peraturan ini dibuat dengan prinsip-prinsip yang ada pada siyasah tanfidziyah untuk mencapai nilai yang adil atau nilai yang mengedepankan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat khususnya kegiatan pencegahan stunting yang diadakan di Desa	

2.3. Kajian Teori

2.3.1. Definisi Peran

Menurut Agustina dalam (M.Aristia Prayudi, dkk 2018:453) peran merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian terjadi melalui cara tertentu dengan memainkan masing – masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku individu lain dilingkungannya.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah peranan atau fungsi yang diemban oleh seseorang, kelompok, atau entitas dalam suatu sistem atau konteks tertentu. Secara lengkap dan jelas, peran mencakup tugas, tanggung jawab, dan kontribusi yang diharapkan dari individu atau entitas tersebut dalam mencapai tujuan atau menjalankan fungsi tertentu, dan juga peran adalah tugas yang melekat pada diri seseorang sebagai identitasnya yang diemban dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena bagaimanapun besar atau kecilnya sebuah tugas harus tetap dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, orang

lain dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya.

Jenis Peran menurut Bruce J. Cohen (1992) dalam Fajar Awaludin 2022 yaitu:

a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorangan dalam mejalankan peranan tertentu.
f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

Dari beberapa jenis peran di atas, penelitian ini menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankannya.

2.3.2. Definisi Pemerintah Desa

Pemeritahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Menurut Dr. Drs. H. Mansyur Achmad KM., M.Si. dalam bukunya Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif regulatif dan aplikatif (2018), Pemerintahan desa adalah wajah pemerintahan Indonesia, maka sejatinya manajemen dan tata kelola

pemerintahan desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola pemerintahan yang moderen berbasis kearifan lokal (local wisdom).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa sebagai badan desa yang memiliki kepentingan untuk melayani kepentingan masyarakat Peran pemerintahan desa yang dibentuk memiliki tugas utama yaitu menggerakkan masyarakat agar bisa menjadi salah satu kekuatan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat untuk memilih beberapa orang masyarakat yang dianggap dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pemilihan Kepala Desa beserta perangkatnya.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan kepemerintahan dan pengelolaan desa yang terdiri dari :

a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa
b. Unsur pembantu Kepala Desa, khususnya perangkat desa yang terdiri dari :
    a. Sekretaris Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa
    b. Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan

c. Faktor kewilayahan, yaitu khususnya pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun

2.3.3. Definisi Penanganan

Penanganan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau kondisi tertentu dengan cara yang terencana dan sistematis. Penanganan dapat dilakukan secara preventif, kuratif, atau rehabilitatif bergantung pada jenis masalah atau kondisi yang sedang ditangani, penanganan juga dapat diartikan sebagai suatu jenis tindakan yang berupa menyentuh, mengendalikan, mengelola, serta menggunakan dimana ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah. Penanganan Menurut World Health Organization (WHO) 2015 yaitu merujuk pada semua aktivitas medis maupun non-medis yang diperlukan untuk mencegah penyakit atau cedera dari berkembang lebih lanjut.

Penanganan dapat memiliki makna dan konteks yang berbeda-beda tergantung pada situasi atau bidang spesifiknya, seperti:

a. Penanganan Kesehatan

   Penanganan kesehatan melibatkan upaya untuk mencegah, mengobati, atau merawat penyakit dan masalah kesehatan. Ini termasuk intervensi medis, promosi kesehatan, dan upaya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan.

b. Penanganan Keadaan Darurat

Dalam konteks keadaan darurat atau bencana alam, penanganan mencakup upaya untuk menyelamatkan nyawa, memberikan bantuan medis, dan memulihkan situasi keadaan darurat. Ini melibatkan koordinasi respon darurat, evakuasi, dan distribusi bantuan kemanusiaan.

c. Penanganan Konflik

Dalam konteks konflik atau ketegangan sosial, penanganan melibatkan strategi untuk meredakan ketegangan, memediasi perbedaan, dan mencari solusi damai. Ini bisa mencakup diplomasi, dialog antar-pihak yang terlibat, dan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi konflik.

d. Penanganan Keamanan

Dalam konteks keamanan, penanganan melibatkan tindakan untuk melindungi dan memastikan keamanan masyarakat. Ini mencakup kebijakan keamanan, penegakan hukum, dan langkah-langkah untuk mengatasi ancaman keamanan.

e. Penanganan Teknologi

Dalam konteks teknologi informasi, penanganan dapat merujuk pada pemecahan masalah, perbaikan, dan pemeliharaan sistem teknologi. Ini mencakup dukungan teknis, manajemen risiko, dan pengelolaan keamanan data.

f. Penanganan Masalah Sosial

Penanganan masalah sosial mencakup upaya untuk mengatasi isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi. Ini melibatkan kebijakan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan advokasi hak asasi manusia

g. Penanganan Proyek

Dalam manajemen proyek, penanganan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan manajemen sumber daya, pengendalian risiko, dan pelaporan kemajuan.

Dari beberapa makna penanganan di atas, penelitian ini merujuk pada makna penanganan kesehatan yang melibatkan upaya untuk mencegah, mengobati, atau merawat penyakit dan masalah kesehatan, penanganan konflik yang melibatkan strategi untuk meredakan ketegangan, memediasi perbedaan, dan mencari solusi, penanganan keamanan yang melibatkan tindakan untuk melindungi dan memastikan keamanan masyarakat, dan penanganan masalah sosial yang mencakup upaya untuk mengatasi isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi.

2.3.4. Definisi Stunting

Menurut WHO (2015) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dengan ditandai panjang atau tinggi badan anak berada di

bawah standar yang terjadi dikarenakan asupan nutrisi yang tidak tercukupi. Stunting adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak – anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis, stunting ini terjadi ketika anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada usia awal lehidupannya terutama pada usia 0-5 tahun. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek daripada tinggi badan rata-rata anak seusianya, menurut WHO (2015) tinggi badan anak yang ideal pada usia 2-5 tahun dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti genetika, jenis kelamin dan pertumbuhan individu, rata-rata tinggi badan anak usia 2-5 tahun berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) untuk anak laki-laki dan perempuan. Usia 2 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 86 cm dan perempuan sekitar 85 cm, usia 3 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 94 cm dan perempuan sekitar 93 cm, usia 4 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 101 cm dan perempuan sekitar 100 cm, usia 5 tahun rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 108 cm dan perempuan sekitar 107 cm.

Stunting ini dapat berpengaruh pada perkembangan fisik dan kognitif anak sehingga berdampak negatif pada kesehatan dan kemampuan belajar anak di masa depan. Faktor penyebab dari stunting ini adalah :

a. Kekurangan Nutrisi

   Faktor utama penyebab stunting adalah kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kurangnya asupan protein, zat besi, zinc, vitamin A, dan vitamin D dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

b. Praktek ASI yang Tidak Optimal

   Pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang tidak optimal atau tidak cukup selama periode kritis pertumbuhan, terutama selama enam bulan pertama kehidupan, dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada bayi

c. Infeksi dan Penyakit Kronis

   Infeksi dan penyakit kronis seperti diare berulang, infeksi pernapasan, dan penyakit menular lainnya dapat menguras energi dan nutrisi tubuh anak. Infeksi yang terus-menerus dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menghambat pertumbuhan normal.

d. Kondisi Sanitasi yang Buruk

   Sanitasi yang buruk, termasuk akses terbatas terhadap air bersih, fasilitas toilet yang aman, dan kebersihan lingkungan, dapat meningkatkan risiko infeksi. Infeksi yang berkaitan dengan kondisi sanitasi yang buruk dapat berkontribusi pada stunting

e. Faktor Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi, seperti kemiskinan, dan faktor sosial, seperti kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pola makan sehat, dapat menjadi penghambat dalam mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan perawatan kesehatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak karena faktor ekonomi dan sosial dapat meningkatkan risiko stunting.

2.3.5. Peran Pemerintah Desa

Kabupaten Bulungan saat ini terdampak masalah stunting diberbagai tempat, data mengenai stunting ini bersumber dari desa, untuk mewujudkan adanya penurunan stunting maka Bupati Bulungan membuat suatu kebijakan mengenai pencegahan stunting melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan No. 13 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan stunting di ubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan No. 42 Tahun 2021 menetapkan dalam Pasal 13 bahwa Pemerintah Desa juga berperan dalam penanganan stunting yaitu Menetapkan priotitas perencanaan pembangunan desa dan alokasi pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa terkait upaya pencegahan stunting, Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan desa melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di

Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) personil Kader Desa dari Kader Posyandu/Kader PAUD/ Kader Kesehatan atau lainnya yang telah mendapatkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan ditugaskan dalam upaya pencegahan stunting di Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait upaya pencegahan stunting kepada masyarakat, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi dapat melakukan koordinasi bersama tim Teknis Pencegahan Stunting Kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Pusat Kesehatan Masyarakat dan lainnya.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan suatu peran sebagai pemerintah desa untuk membuat atau menjalankan suatu kebijakan dalam permasalahan stunting di desa yaitu :

a. Faktor pendukung meliputi kooordinasi dan kolaborasi pemerintah desa dan instansi yang terkait, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, serta aksesibilitas informasi dan edukasi kesehatan
b. Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya kesehatan, serta tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pola makan dan gizi

2.4. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah :

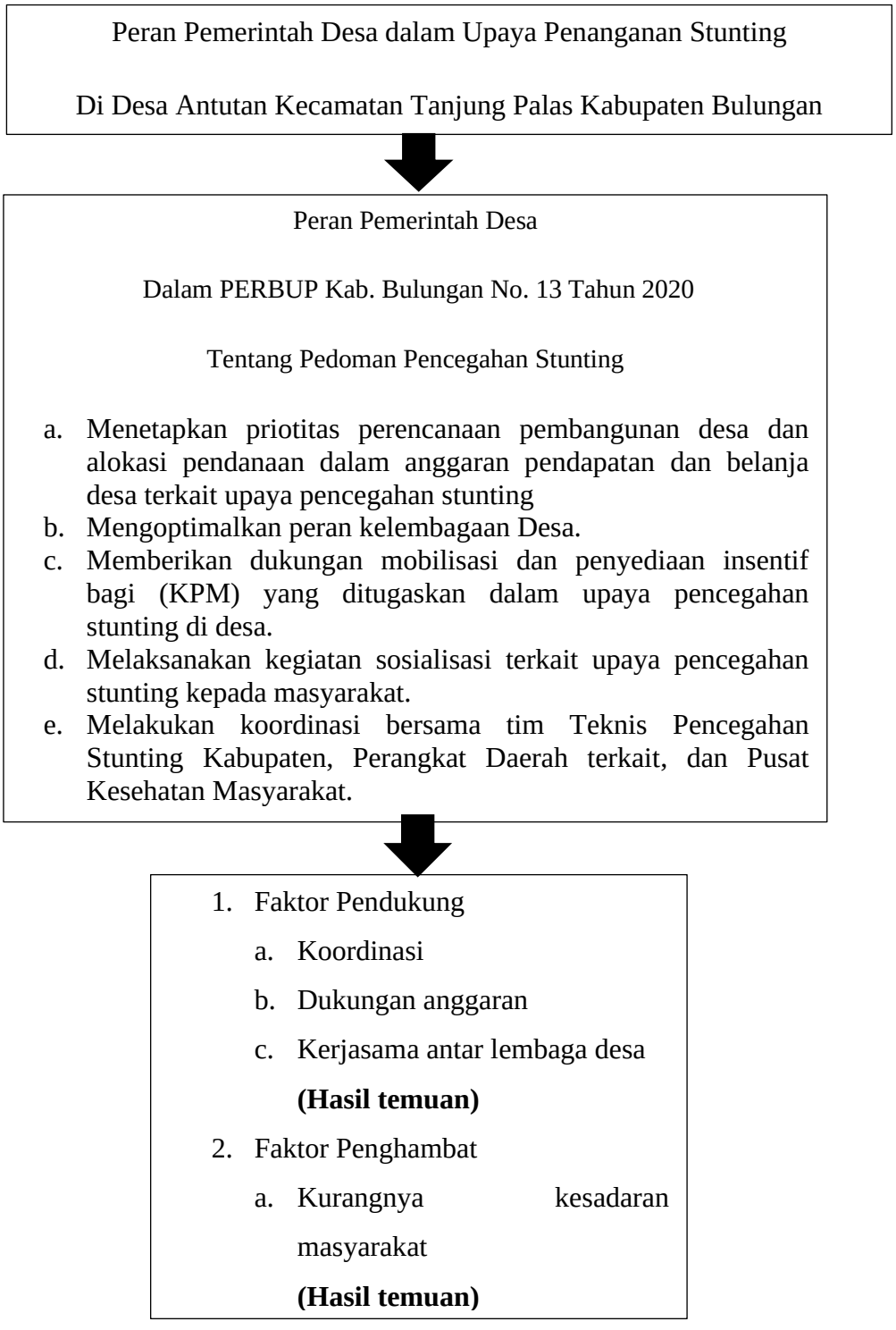

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan data dalam penyajian bentuk skripsi.

Tabel 3.1.

Waktu Penelitian

<table>
<tr><th>No.</th><th>Agenda</th><th colspan="4">Bulan</th><th>Target</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Seminar Judul</td><td rowspan="3">Juli</td><td rowspan="3">November</td><td rowspan="2">Desember</td><td rowspan="2">Januari 2024</td><td rowspan="2">✓</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Seminar Proposal</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Perbaikan/Penelitian</td><td colspan="2">2023</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Seminar Hasil/Ujian Skripsi</td><td colspan="4">April 2024</td><td>√</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Perbaikan dan Penyusunan</td><td colspan="4">Mei 2024</td><td>Proses</td></tr>
</table>

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi di lingkungan penelitian dan menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi serta situasi berdasarkan fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

3.3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun wawancara dengan informan. Dalam hal ini melalui proses wawancara dari para informan yaitu langsung dari Kepala Desa Antutan, Sekretaris Desa, Ketua Posyandu Panginbaya, Tunas Baru, Masbah, Sekretaris Posyandu Sesula, Pihak Puskesmas Antutan, Ketua Bina Keluarga Balita, Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Adat, Ketua RT, dan masyarakat Desa Antutan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun data primer dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel informan sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Jumlah Informan

No.	Posisi/Jabatan	Sumber Data	Jumlah
1.	Kepala Desa	Primer	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	Primer	1 Orang
3.	Kasi Kesejahteraan	Primer	1 Orang
4.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Primer	1 Orang
5.	Bina Keluarga Balita (BKB)	Primer	1 Orang
6.	Puskesmas (Ahli Gizi)	Primer	1 Orang
7.	Kepala Adat Dusun 3	Primer	1 Orang
8.	Sekretaris PKK	Primer	1 Orang
9.	Ketua Posyandu Masbah	Primer	1 Orang
10.	Ketua Posyandu Panginbaya	Primer	1 Orang
11.	Ketua Posyandu Tunas Baru	Primer	1 Orang
12.	Sekretaris Posyandu Sesula	Primer	1 Orang
13.	Ketua RT 07	Primer	1 Orang
14.	Ketua RT 10	Primer	1 Orang
15.	Ketua RT 11	Primer	1 Orang
16.	Risnawati	Primer	1 Orang

17.	Merry	Primer	1 Orang
18.	Susi	Primer	1 Orang
19.	Rini Larin	Primer	1 Orang
20.	Muhammad Wahyu	Primer	1 Orang
Total			**20 0rang**

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari sumber data pendukung yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji atau data yang diperoleh melalui kepustakaan dan juga data dari pemerintah terkait.

3.4. Fokus Penelitian

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini, maka peneliti hanya membahas tentang ”Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan apa Faktor Pendukung Dan Penghambat dalam penanganan stunting di Desa Antutan ”

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial melalui pengamatan

dan pencatatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, objek, kejadian atau peristiwa dan waktu. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa observasi atau pengamatan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanganan Stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data. Wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang valid tentang Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanganan Stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan faktor pendukung dan penghambat

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari informan

untuk mendukung kevalidan data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan, hasil wawancara dan hasil rekaman dilapangan.

3.6. Uji Validasi Data

Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, penulis menjaga keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dengan data yang ada.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi lebih mengutamakan keefektifan proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah proses wawancara dan hasil tes yang digunakan berjalan dengan baik. Tes dan wawancara digabungkan untuk mendapatkan informasi data yang relevan. Apabila informasi yang diperoleh dari hasil tes wawancara tidak dapat memenuhi keakuratan data, maka akan diteliti lebih dalam selama wawancara berlangsung. Sehingga akan tercapai kombinasi antara hasil tes dan wawancara yang selanjutnya akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Dan juga bandingkan hasil antara teks satu dan teks dua dengan pertanyaan yang hampir sama

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain. Tujuan analisis data

adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan.

Langkah langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan Data *(Data Collection)*

Pengumpulan data merujuk pada proses mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan fokus peneltian, data ini diperoleh saat di lokasi penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung dilokasi penelitian terkait permasalahan yang ingin di teliti, wawancara adalah memperoleh data secara langsung dengan informan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, dokumentasi adalah data yang diperoleh dari lapangan berupa catatan penting, hasil wawancara dan foto-foto

b. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Data dikumpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian. Reduksi data yang dimaksudkan di sini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah di

ringkas disusun lebih sistematis serta ditonjolkan pokok pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan

c. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data yang telah diperoleh dilapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhka dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut maka diharapkan dapat memberikan kejelasan pada data yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing/Verification)*

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat semengtara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian dilakukan dalam hal pengumpulam data melalui informan. Setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan oleh informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari judul penelitian yang penulis angkat.

Dari penjelasan di atas, berikut model teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2018 :

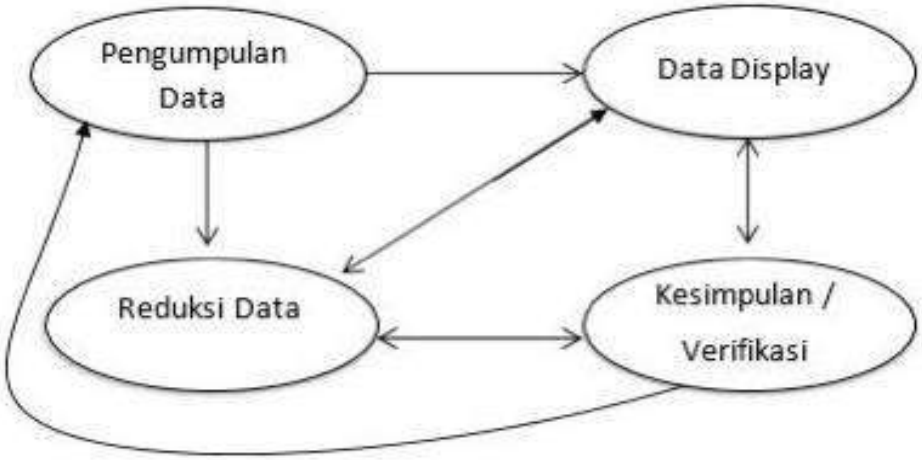

Gambar 3.1.

Model analisis data

(Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2018)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Ritek

Secara administrasi Desa Antutan merupakan salah satu desa diantara 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang terletak kurang lebih 14 KM dari Ibukota Kecamatan Tanjung Palas, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Letak Desa Antutan berada di pesisir Sungai Kayan sepanjang kurang lebih 10 KM dengan luas wlayah kurang lebih 40.750 Ha dengan batas- batas desa meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pejalin, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Seriang, Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mara Hilir. Desa Antutan terdiri dari 13 RT dan 3 RW. Pada umumnya Desa Antutan memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

4.1.1. Sejarah Desa Antutan

Sejak tahun 1925 Desa Antutan mulai dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Kampung dengan pusat desa yang berpindah-pindah. Pada tahun 1985 sebutan Kepala Kampung diganti menjadi Kepala Desa. Sebelum tahun 1925 penduduk Desa Antutan hanya terdapat beberapa rumah dengan jarak yang berjauhan, asal mulanya penduduk Desa Antutan adalah dari Tanjung Palas dan sebelum adanya Kepala Kampung yang

memimpin Desa Antutan sistem Pemerintahan masih ikut dengan Pemerintahan Kerajaan Bulungan yang berpusat di Tanjung Palas.

Menurut beberapa sumber yang dihimpun, Desa Antutan sejak tahun 1925 sampai sekarang mengalami pergantian Kepala Kampung / Kepala Desa sebanyak (10) Sepuluh kali pergantian dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Kampung Mbang Leking masa jabatan tahun 1925-1953
b. Kepala Kampung Adang Ifung masa jabatan tahun 1953-1958
c. Kepala Kampung Lingai Ragot masa jabatan tahun 1958-1968
d. Kepala Kampung Akui Tadan masa jabatan tahun 1968-1970
e. Kepala Kampung Surang Yo masa jabatan tahun 1970-1985
f. Kepala Desa Lagi Usat masa jabatan tahun 1985-1995
g. Kepala Desa Jalin Udau masa jabatan tahun 1995-2001
h. Kepala Desa Jalin Udau masa jabatan tahun 2001-2009
i. Kepala Desa Erisyah Ajang masa jabatan tahun 2009-2014
j. Kepala Desa Erisyah Ajang masa jabatan tahun 2014-2020
k. Kepala Desa Aminudin masa jabatan tahun 2021-2027

4.1.2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan yang digunakan sebagai sebuah tujuan serta apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. visi kepala desa yang selanjutnya menjadi visi Desa Antutan adalah “TERWUJUDNYA DESA YANG

MANDIRI, AMAN, SEHAT, CERDAS, BERDAYA SAING, BERBUDAYA, BERAKHLAK MULIA, DAN MENJADIKAN DESA ANTUTAN KAWASAN PUSAT PERTANIAN DAN AGROBISNIS".

b. Misi

Misi adalah usaha-usaha atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. dengan kata lain misi merupakan penjabaran dari visi. penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa 6 (enam) tahun.untuk merevisi seperti yang sudah dijabarkan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Antutan sebagai berikut :

1) Meningkatkan pemerataan pembangunan desa, serta meningkatkan kualitas pembangunan dan prasarana desa.
2) Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya dibidang pertanian dan perkebunan
3) Pengelolaan anggaran desa secara transparansi dan akuntabel
4) Meningkatkan kerja sama dengan semua pihak yang dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat desa

5) Menggali potensi-potensi yang ada untuk menambah pendapatan asli desa

6) Peningkatan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya ekonomi lemah

7) Peningkatan di bidang kesehatan masyarakat

8) Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga Desa Antutan

4.1.3. Kondisi Desa Antutan

Desa Antutan terletak di sebalah Barat antara desa-desa di Kecamatan Tanjung Palas dan merupakan desa terjauh dari pusat Kecamatan. Letak Desa Antutan berada di pesisir Sungai Kayan sepanjang ± 10 KM dengan luas wlayah ± 40.750 Ha dengan batas-batas desa sebagai berikut :

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pejalin
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Seriang
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mara Hilir

Desa Antutan ditinjau dari orbitasi :

a) Jarak ke Ibu kota Kecamatan ± 14 KM dengan waktu tempuh menggunakan angkutan reguler sekitar 30 menit.
b) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten ± 30 KM dengan waktu tempuh sekitar 60 menit dengan menggunakan angkutan darat reguler

4.1.4. Demografi Desa Antutan

Jumlah penduduk Desa Antutan pada tahun 2020 sebanyak 2.264 jiwa terdiri dari laki – laki 1.208 jiwa dan perempuan 1.056 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 604.

a. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data penduduk menurut golongan umur di Desa Antutan dapat dilihat pada Tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Golongan Umur	Jumlah
0 Bln – 15 Thn	548 Jiwa
16 Thn – 65 Thn	1.659 Jiwa
66 Tahun keatas	101 Jiwa

Sumber : Profil Desa Antutan Tahun 2022

b. Jumlah Kepala Keluarga Per RT

Data Kepala Keluarga per RT dapat dilihat pada table berikut di bawah ini :

Tabel 4.2.

Jumlah Kepala Keluarga per RT

No.	Nama RT	Jumlah KK
1	RT 1	57 KK
2	RT 2	46 KK
3	RT 3	35 KK
4	RT 4	55 KK
5	RT 5	22 KK
6	RT 6	59 KK

7	RT 7	57 KK
8	RT 8	40 KK
9	RT 9	59 KK
10	RT 10	70 KK
11	RT 11	35 KK
12	RT 12	35 KK
13	RT 13	38 KK

Sumber : Profil Desa Antutan Tahun 2022

c. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Antutan mayoritas beragama kristen protestan, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 906 orang
- Kristen : 973 orang
- Katolik : 381 orang
- Hindu : 4 orang

d. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.3.

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	462 Jiwa
2	SLTP	579 Jiwa
3	SLTA	950 Jiwa
4	Diploma / Sarjana	120 Jiwa
5	Pasca Sarjana	3 Jiwa
6	Magister	2 Jiwa

Sumber : Profil Desa Antutan Tahun 2022

e. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Antutan sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.4.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	TNI / Polri	9 Jiwa
2	Pegawai Negeri Sipil	51 Jiwa
3	Karyawan	255 Jiwa
4	Petani	855 Jiwa
5	Nelayan	40 Jiwa
6	Wiraswasta	30 Jiwa
7	Pedagang	25 Jiwa

Sumber : Profil Desa Antutan Tahun 2022

4.1.5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Antutan

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa,yaitu: Pemerintahan Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD),dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Susunan Struktur Pemerintah Desa Antutan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 4.1.

Sturktur Ogranisasi Pemerintah Desa Antutan

Sumber : Profil Desa Antutan Tahun 2022

4.1.6. Daftar Stunting Di Desa Antutan

a. Daftar Stunting Tahun 2020

Stunting di Desa Antutan pada tahun 2020 mencapai 7 anak yang rata – rata berusia 1 tahun sampai dengan 2 tahun, berikut tabel stunting pada tahun 2020:

Tabel 4.5.

Data Stunting Tahun 2020

No	Nama	JK	Tgl Lahir	BB/TB Lahir	Usia Saat Ukur	BB	Tinggi	BB/U	ZS BB/U	TB/U
1.	El Jevan	L	2018-04-15	2.8/49	2 Tahun - 4 Bulan - 7 Hari	9.9	81.5	K	2.33	P
2.	Kendrick Hizkia	L	2019-06-12	2.8/49	1 Tahun - 2 Bulan - 10 Hari	8.2	71	N	1.95	P
3.	Holly	L	2018-06-26	2.8/49	2 Tahun - 1 Bulan - 27 Hari	9.3	81.8	K	2.59	P
4.	Azora Menita	L	2019-05-27	2.8/49	1 Tahun - 2 Bulan - 26 Hari	7.6	71.3	K	2.73	SP
5.	Jualita Christy	P	2019-07-07	2.8/49	1 Tahun - 1 Bulan - 16 Hari	7.6	72	K	2.48	P
6.	Vioneta	L	2019-06-17	2.8/49	1 Tahun - 2 Bulan - 5 Hari	8.3	72	N	1.81	P
7.	Geonathan	L	2018-02-25	2.8/49	2 Tahun - 5 Bulan - 26 Hari	12.2	81.2	N	0.31	P

Sumber: Pemerintah Desa Antutan

b. Daftar Stunting Tahun 2021

Stunting di Desa Antutan pada tahun 2021 mencapai 4 anak yang rata – rata berusia 1 tahun sampai dengan 2 tahun, berikut tabel stunting pada tahun 2021:

Tabel 4.6

Data Stunting Tahun 2021

No	Nama	JK	Tgl Lahir	BB/TB Lahir	Usia Saat Ukur	BB	Tinggi	BB/U	ZS BB/U	TB/U
1.	Daeng Alfarik	L	2018-06-08	3/58	2 Tahun – 8 Bulan - 3 Hari	10	83.2	K	2.65	P
2.	M.Abidzar	L	2019-08-18	2.8/49	1 Tahun - 5 Bulan - 23 Hari	8.4	74.5	K	2.33	P
3.	Holly	L	2018-06-26	2.8/49	2 Tahun - 1 Bulan - 27 Hari	9.3	81.8	K	2.59	P
4.	Azora Menita	L	2019-05-27	2.8/49	1 Tahun - 2 Bulan - 26 Hari	7.6	71.3	K	2.73	SP

Sumber: Pemerintah Desa Antutan

c. Daftar Stunting Tahun 2022

Stunting di Desa Antutan pada tahun 2022 mencapai 4 anak yang rata – rata berusia 1 tahun sampai dengan 3 tahun, berikut tabel stunting pada tahun 2022:

Tabel 4.7

Data Stunting Tahun 2022

No	Nama	JK	Tgl Lahir	BB/TB Lahir	Usia Saat Ukur	BB	Tinggi	BB/U	ZS BB/U	TB/U
1.	El Jevan	L	2018-04-15	2.8/49	3 Tahun - 9 Bulan - 29 Hari	11.5	92	K	2.66	P
2.	Syalom	P	2020-07-16	2.8/50	1 Tahun - 6 Bulan - 28 Hari	8	75	K	2.23	P
3.	Rara	P	2018-11-28	2.2/47	3 Tahun - 2 Bulan - 18 Hari	10.6	87	K	2.42	P
4.	Rere	P	2018-11-29	2.1/.47	3 Tahun - 2 Bulan - 19 Hari	10.6	88.7	K	2.42	SP

Sumber: Pemerintah Desa Antutan

Berdasarkan data di atas terdapat penurunan angka stunting yang cukup baik, berikut grafik stunting Desa Antutan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 :

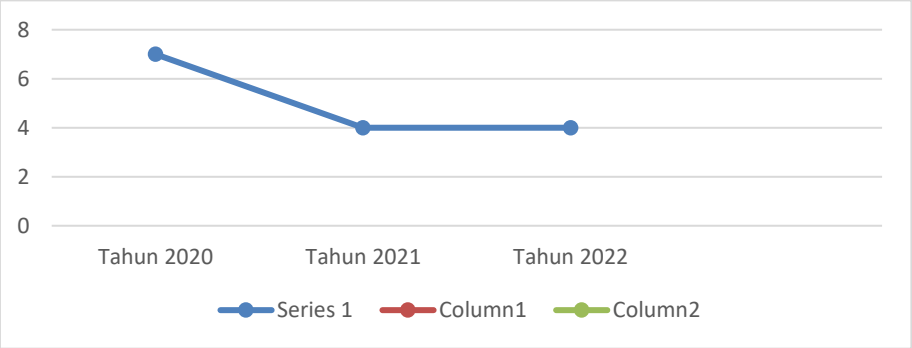

Gambar 4.2
Grafik Stunting Desa Antutan

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antutan

Penanganan stunting di desa perlu adanya peran pemerintah desa yang aktif sehingga dapat mewujudkan adanya penurunan stunting di desa, pemerintah desa yang dapat membuat suatu kebijakan yang tepat untuk dapat mengatasi masalah stunting dan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang bemutu dan berkualitas. Peran pemerintah desa yang dimaksud secara rinci telah ditetapkan pada Peraturan Bupati (PERBUP) No. 13 Tahun 2020 di ubah dengan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Stunting menyatakan bahwa Menetapkan priotitas perencanaan pembangunan desa dan alokasi

pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa terkait upaya pencegahan stunting Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan desa melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) personil Kader Desa dari Kader Posyandu/Kader PAUD/ Kader Kesehatan atau lainnya yang telah mendapatkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan ditugaskan dalam upaya pencegahan stunting di Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait upaya pencegahan stunting kepada masyarakat, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi dapat melakukan koordinasi bersama tim Teknis Pencegahan Stunting Kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sejalan dengan hal itu peran Pemerintah Desa Antutan dalam hal upaya penanganan stunting di Desa Antutan sebagai berikut:

a. Menetapkan Priotitas Perencanaan Pembangunan Desa dan Alokasi Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terkait Upaya Pencegahan Stunting

Rencana pembangunan desa adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa yang

menggambarkan secara rinci program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memajukan desa. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa melalui berbagai aspek, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Rencana pembangunan desa prioritas adalah suatu perencanaan yang menekankan pada program-program atau proyek yang dianggap paling penting dengan tujuan mempercepat perkembangan dan peningkatan kualitas hidup di desa.

Dalam hal penanganan stunting rencana pembangunan desa sangat diperlukan untuk melihat isu prioritas yang akan menjadi skala prioritas dalam pembangunan desa dikarenakan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, serta berperan dalam mengajak partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses pembangunan yang ada di desa, serta alokasi pendanaannya juga sesuai dengan program – program yang akan dillaksanakan dalam pencegahan stunting di desa, Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Kepala Desa Antutan Yaitu Aminudin A.K mengenai Apakah masalah stunting merupakan skala prioritas dari RPJMDES Desa Antutan, Pencegahan stunting masuk

dalam urutan keberapa dalam skala prioritas, Untuk alokasi pendanaannya digunakan untuk apa saja:

> *"...Iya pencegahan stunting ini juga masuk dalam prioritas rencana pembangunan desa di Desa Antutan ini karenakan sutnting ini juga menjadi skala porioritas pemerintah daerah maka dari itu kami pemerintah Desa Antutan juga menjadikan stunting ini sebagai rencana pembangunan prioritas dibidang kesehatan, untuk alokasi dana nya kami gunakan untuk pembagian pmt lokal dari pemerintah desa, pembagian biskuit, pemberian insentif, membeli alatkesehatan posyandu, merehab posyandu di Desa Antutan."*
> *(Wawancara tanggal 22 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris Desa Antutan, yaitu Riyon Rikartu, ST:

> *"...Semua diprioritas kan,namun secara umum untuk kesehatan ini diurutan nomor dua setelah pembangunan lalu kesehatan dan poendidikan kemudian semuanya sama-sama prioritas artinya semua bidang itu juga menjadi skala prioritas kami, dari sistem itu juga ada detail-detail tentang stunting, kalauy untuk alokasi pendanaannya kami gubakan untuk pemberian bubur, susu secara merata dan ada lebihan untuk stunting, biaya insentif, rehab posyandu, belanja untuk kesehatan seperti timbangan ."*
> *(Wawancara tanggal 24 Januari 2024)*

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Kasi Kesejahteraan Desa Antutan yaitu Ajang Kuling:

> *"...Sebenarnya semua nya menjadi skala prioritas, contohnya dari bidang pembinaan memberikan operasional kepada posyandu agar dapat menjalankan posyandunya, bidang pemberdayaan itu pelatihan atau*

penyuluhan dan dari disetiap bidang ada berbicara tentang pencegahan stuntingnya, bidang pembangunan dengan memenuhi fasilitas dan merehab posyandu, di bidang pembinaan memberikan oprasional, pemberdyaan adanya pelatihan kepada ibu-ibu agar bisa memberikan makanan yang sehat dan pola asuh anak."
(Wawancara tanggal 24 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan stunting di Desa Antutan pemerintah Desa Antutan menjadikan stunting ini sebagai skala prioritas dalam artiannya semua bidang juga menjadi bagian prioritas, dari sistem tersebut juga terdapat detail-detail mengenai pencegahan stunting. Alokasi pendanaannya sesuai dengan RPJMDES Antutan digunakan untuk kegiatan posyandu seperti membagikan bubur secara merta kepada anak, memberikan susu secara merata, dan juga merehab posyandu, memberikan insentif kepada kader- kader, dan memfasilistasi alat kesehatan diposyandu.

b. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan Desa

Kelembagaan Desa merupakan kumpulan orang – orang yang melakukan kerjasama dan tergabung dalam lembaga / organisasi desa yang mempunyai tujuan dan mempunyai fungsi menyokong, membantu pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk mencapai suatu tujuan pemerintah desa memiliki peran krusial

dalam mengoptimalkan peran kelembagaan desa untuk memajukan dan mengembangkan potensi yang ada di desa.

Dalam hal penanganan stunting lembaga desa / organisasi memiliki beberapa kelembagaan yang ada di desa dengan begitu peran kelembagaan desa sangat diperlukan karena masalah ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan pendekatan multi-sektor, Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Kepala Desa Antutan, yaitu Aminudin A.K mengenai Lembaga desa apa saja yang terlibat dalam penanganan stunting di Desa Antutan dan bagaimana pemerintah desa mengoptimalkan peran kelembagaan desa:

> *"...Lembaga desa yang terlibat dalam penanganan stunting di Desa Antutan ini semua lembaga termasuk KPM (Kader Pembangunan Manusia), kader posyandu, BKB (Bina Keluarga Balita), dan RT. Kami mengoptimalkan nya dengan adanya pembinaan kader lembaga desa seperti adanya rembuk stunting yang dimana ada edukasi mengenai pengoptimalan stunting." (Wawancara tanggal 22 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris Desa Antutan yaitu Riyon Rikartu, ST:

> *"...Untuk lembaga desa yang terlibat dalam penanganan stunting ini ada KPM (Kader Pembangunan Manusia), kader posyandu, BKB (Bina Keluarga Balita), mengenai optimal Pemerintah Desa melakukan peningkatan kapasitas dengan adanya pembinaan meningkatan kapasitas agar kader yang terlibat itu paham mengenai fungsi dan tugasnya."*

(Wawancara tanggal 24 Januari 2024)

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Kasi Kesejahteraan Desa Antutan yaitu Ajang Kuling:

> *"...Semua lembaga terlibat seperti KPM (Kader Pembagunan Manusia), Posyandu, RT. Mengenai optimal kami mengadakan penyuluhan atau pembinaan kepada lembaga desa mengenai penanganan dan pencegahan stunting yang narasumbernya berasal dari puskesmas setempat."*
> *(Wawancara tanggal 23 Januari 2024)*

Dari ketiga pernyataan di atas, berikut ini merupakan dokumentasi dari pengoptimalkan peran kelembagaan desa mengenai pembinaan kader kesehatan Desa Antutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Antutan dan Puskesmas Desa Antutan:

Sumber Data Sekunder 2022

Gambar 4.3.

Pembinaan Kepada Kader Posyandu Tentang Stunting dan Pola Asuh Anak

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan stunting di Desa Antutan semua lembaga desa berperan penting untuk mengoptimalkannya pemerintah desa memberikan penyuluhan atau pembinaan berupa peningkatan kapastitas kader–kader lembaga desa yang narasumber nya sendiri dari puskemas setempat agar sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

c. Adanya Dukungan Mobilisasi dan Insentif bagi KPM

Dalam penanganan stunting semua lembaga desa yang terlibat diberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif, hal ini adalah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, motivasi, dan partisipasi kader–kader lembaga dalam program atau kegiatan penanganan stunting

Kombinasi dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif untuk lembaga desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik itu untuk kepentingan masyarakat desa atau kepentingan lembaga desa yang menangani hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Ketua KPM (Kader Pembangunan Manusia) yaitu Johar mengenai apakah pemerintah desa memberikan dukungan mobilisasi dan

penyediaan insentif untuk lembaga desa dan berapa insentif yang diberikan kepada lembaga desa:

> *"...Dukungan mobilisasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa itu adalah membuat dan mengimplementasikan kebijakan berupa penyediaan bahan pangan lokal , insentif ada diberikan di setiap lembaga desa teutama lembaga desa KPM itu juga ada diberikan oleh Pemerintah Desa sebesar Rp. 150. 000,- per orang yang di keluarkan setiap 6 (Enam) bulan sekali."*
> *(Wawancara tanggal 22 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yaitu Idha Lukman:

> *"...Kalau insentif itu ada, kalau secara keseluruhan pertahun dihitungnya untuk BKB Rp. 5.400.000,- untuk kader posyandu Rp. 5.400.000,- untuk KPM Rp. 3.600.000,- . Dana insentif itu diberikan oleh bendahara desa kemudian nanti dibagi per orangnya."*
> *(Wawancara tanggal 23 Januari 2024)*

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Ketua Posyandu Tunas Baru yaitu Mardiana:

> *"...Dari pemerintah desa itu ada juga pembagian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk anak yang terdampak stunting, untuk insentifnya ada untuk kader posyandu, dana nya sebesar Rp. 150.000,- per orang atau masing-masing kader posyandu, dana itu diberikan oleh Pemerintah Desa Antutan."*
> *(Wawancara tanggal 25 Januari 2024)*

Dari ketiga pernyataan di atas, berikut ini merupakan data insentif kader kesehatan dari pemerintah Desa Antutan:

Sumber Data Sekunder 2022

Gambar 4.4.

LPJ Penggunaan Dana Insentif Kader

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas kader lembaga desa maka Pemerintah Desa Antutan memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif untuk tiap – tiap lembaga Desa Antutan yaitu kader BKB (Bina Keluarga Balita) Desa Antutan, KPM (Kader Pembangunan Manusia) Desa Antutan, 4 Posyandu yaitu posyandu tunas baru, posyandu panginbaya, posyandu masbah dan posyandu sesula.

d. Melaksanakan Sosialisasi terkait Upaya Pencegahan Stunting Kepada Mayarakat

Sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting merupakan proses aktif untuk meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting, sosialisasi stunting ini bertujuan untuk memberikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat terkait dampak dan penyebab dari stunting.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Antutan memainkan peranan yang sangat penting karena pemerintah desa wajib memerhatikan kondisi kesehatan dari setiap warga nya dan harus mampu memberikan edukasi dan juga memberikan prasarana untuk warga nya. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Sekretaris Desa Antutan yaitu Riyon Rikartu, ST mengenai apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya penanganan stunting di Desa Antutan dan berapa kali melaksanakan sosialisasi:

> *"...Pemerintah desa punya kegiatan sosialisasi atau rembuk stunting setahun sekali tetapi kalau lembaga desa ya sering kali karena tugas nya itu memberikan edukasi, dan juga memberikan makanan tambahan misalnya bubur kepada balita yang diberikan setiap bulan."*
> *(Wawancara tanggal 24 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Ketua RT 10 yaitu Baderun:

> *"...Iya ada melakukan sosialisasi stunting biasanya di setiap pertemuan dan ada juga yang setahun sekali yaitu rembuk stunting dan kalau dari RT juga dihimbau untuk memberikan edukasi ke masyarakat di RT nya untuk tetap*

menjaga kebersihan lingkungan atau PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), misalnya kegiatan gotong royong di lingkungan RT setempat yang biasanya dilaksanakan setiap sebulan sekali."
(Wawancara tanggal 6 Februari 2024)

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Ketua Adat Bulungan Dusun 3(Tiga) yaitu H. Baharudin:

"...Sosialisasi stunting itu ada yaitu rembuk stunting biasanya dilaksanakan setiap setahun sekali, dalam kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengidentifikasi dan menganalisis penyebab stunting di Desa Antutan termasuk tantangan yang ada."
(Wawancara tanggal 6 Februari 2024)

Dari ketiga pernyataan di atas, berikut ini merupakan dokumentasi dan absensi kehadiran peserta dalam kegiatan sosialisasi pencegahan stunting oleh Pemerintah Desa Antutan:

Sumber Data Sekunder 2022

Gambar 4.5.

Rembug Stutning Desa Antutan

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN TANJUNG PALAS
DESA ANTUTAN

DAFTAR HADIR SOSIALISASI REMBUG
STUNTING TAHUN 2022
DESA ANTUTAN

Hari/Tanggal : 27 April 2022

Sumber Data Sekunder 2022

Gambar 4.6.

Absensi Kegiatan Rembug Stunting

Sumber Data Sekunder 2022

Gambar 4.7.

Kegiatan posyandu rutin

Sumber Data Sekunder 2022

Gambar 4.8.

Pembagian PMT LOKAL Kepada Anak

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Antutan melaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan stunting ke masyarakat yang dilaksanakan di setiap pertemuan dan juga adanya rembuk stunting tingkat kecamatan yang melibatkan lembaga – lembaga di Desa Antutan serta pemerintah desa yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah stunting serta tantanngan yang di hadapi.

e. Melakukan koordinasi Bersama Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat

Koordinasi bersama kabupaten, daerah maupun pusat kesehatan masyarakat berarti kerjasama dan komunikasi antara lembaga atau departemen yang terlibat dalam upaya pencegahan stunting, seperti Pemerintah Desa Antutan berkoordinasi bersama tim teknis pencegahan stunting kabupaten, daerah maupun pusat kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah stunting di Desa Antutan.

Koordinasi ini sangat diperlukan karena pencegahan stunting ini bukan hanya tanggung jawab desa saja melainkan melibatkan semua sektor. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Kepala Desa Antutan yaitu Aminudin A.K mengenai bagaimana pemerintah desa melakukan koordinasi terkait pencegahan stunting kepada tim teknis pencegahan stunting Kabupaten, Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dan apa kontribusi yang diberikan:

> *"...Dengan adanya pertemuan – pertemuan bersama puskemas dan juga adanya rembuk stunting. Koordinasi itu sudah ada yang paling kerab itu puskesmas Desa Antutan, dan kontribusi yang diberikan oleh puskesmas itu ikut memantau, mendata, mereka terlibat langsung dalam penanganan stunting ini."*
> *(Wawancara tanggal 22 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris Desa yaitu Riyon Rikartu, ST:

> *"...Dengan adanya pertemuan rutin dengan berbagai tema bersama pusat kesehatan masyarakat di Desa Antutan yaitu pengoptimalan stunting, penurunan stunting, dan lain – lain sebagainya, dengan begitu secara tidak langsung kami pemerintah desa berkoordinasi karena ini program Nasional dan Daerah pun punya program yang pesertanya dari desa. kalau kontribusi berupa edukasi yang diberikan dari puskesmas serta memberikan bantuan alat."*
> *(Wawancara tanggal 24 Januari 2024)*

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Ahli Gizi Puskesmas Desa Antutan yaitu Muhammad Dwi, S. Gz:

> *"...Kalau koordinasi sudah pasti ada, dari desa itu biasanya dari musrembang, kalau data stunting itu kan dari puskesmas, tiap tahun itu kita ada musrembang. Kalau koordinasi ke dinas kesehatan juga sudah pasti ada kita ada follow up nya ke Dinas Kesehatan karena dinas kesehatan itu atasan kita dan kami dari puskesmas ini menajalankan, kalau dari desa itu bantuannnya dapat pmt itu juga ada dananya seperti bubur makanan kacang hijau itu setiap posyandu selama 12 kali pasti ada dananya sendiri dari desa, sedangkan dari dinas itu ada kegiatan kiita namanya PMT Lokal. Sosialisasi mengenai stunting dari puskesmas ke masyarakat itu ada, sosialisasi itu disetiap posyandu setiap bulan konseling, stunting ini rumit semuanya jalan, keslingnya jalan, kesmasnya jalan, gizinya jalan, bidan dan kia nya jalan, perawatnya jalan, dari desa juga jalan, kami pun ikut turun kelapangan. Kegiatannya kalau dari bidang gizi itu ada konseling gizi tiap bulan, stunting itukan indikator nya tinggi badan per umur, konseling gizi ini disetiap bulan misalnya bulan ini bb nya kurang kita adakan konseling ke orang tua dan bulan depannya kita cek lagi perkembangan anaknya kalau masih pendek lagi kita kasih pmt lokal, kita kasih biskuit dari puskesmas dan itu dari dinas kesehatan juga dan dari desa juga dia pasti dapat, bulan depan itu cek lagi kalau masih pendek kasih lagi sampai pertumbuan dan perkembangan badannya normal, dari kesling itu ada juga setahun 2 kali konsultasi tentang kebersihan lingkungan dan PHBS".*
>
> *(Wawancara tanggal 29 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Antutan melakukan koordinasi bersama pusat kesehatan masyarakat dan juga ke dinas kesehatan dan dari koordinasi itu ada jalur komunikasi nya dari dinas kesehatan ke puskesmas dan ke desa, dalam hal penanganan stunting di Desa

Antutan ini semua nya terlibat baik itu dari pemerintah desa nya, dari kader kader kesehatannya maupun dari puskesmasnya dan juga kontribusi yang diberikan itu sangat banyak dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan ini seperti bimbingan konseling untuk orang tuanya dan juga ada pembagian pmt dari desa dan juga pmt lokal dari puskesmas.

4.2.2. Faktor–Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antuttan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

a. Faktor Pendukung

1) Koordinasi

Dalam penanganan stunting di desa pemerintah desa tentunya memerlukan kontribusi dan juga koordinasi dengan instansi ataupun pusat kesehatan masyarakat setempat terkait pencegahann stunting, sama hal nya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Antutan yang melakukan koordinasi bersama puskesmas dan juga instansi terkait pencegahan stunting.

Koordinasi yang baik antar instansi, pemerintah desa dan puskesmas merupakan kunci untuk menangani masalah stunting di Desa Antutan secara efektif, sehingga dapat mempercepat penurunan angka stunting dan memperbaiki kualitas hidup anak – anak dan keluarga di Desa Antutan,

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Sekretaris Desa yaitu Riyon Rikartu, ST mengenai apa faktor pendukung dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan:

> *"...Untuk faktor pendukungnya salah satunya adanya kerja sama dengan puskesmas antutan serta dinas kesehatannya lalu kontribusi yang diberikan oleh puskesmas Antutan berupa pembinaan kader – kader serta pihak puskesmas juga terlibat langsung."*
> *(Wawanncara tanggal 24 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Ketua Posyandu Masbah yaitu Marethariana:

> *"...Untuk pendukung salah satunya yaitu kerjasama antara pemerintah desa, kader – kader dan juga puskesmas di Desa Antutan ini sehingga bisa menjalankan satu program atau upaya dalam penananganan stunting khususnya di Desa Antutan."*
> *(Wawancara tanggal 25 Januari 2024)*

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Ketua KPM (Kader Pembangunan Masyarakat) yaitu Johar:

> *"...Faktor pendukungnya selain dari anggaran yaitu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa ke puskesmas Antutan dan juga adanya kerjasama antar kader- kader dengan puskesmas."*
> *(Wawancara tanggal 22 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi antara Pemerintah Desa Antutan dengan pusat kesehatan masyarakat Desa Antutan dan juga dinas kesehatan sebagai pelopor puskesmas Antutan dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan merupakan salah satu faktor yang pendukung dalam peran Pemerintah Desa Antutan.

2) Dukungan Anggaran

Dalam penanganan stunting dukungan anggaran merupakan komponen yang menjamin tersedianya sumber daya finansial untuk mengimplementasikan berbagai program yang tertuju untuk mengurangi stuntijg di desa, sama hal nya di Desa Antutan dalam mengurangi stunting dukungan anggaran sangat dperlukan untuk memenuhi program maupun intervensi, pemerintah desa juga memastikan dukungan anggaran dalam penanganan stunting di Desa Antutan itu sudah pasti ada, Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Ketua Posyandu Tunas Baru yaitu Mardiana mengenai faktor pedukung dalam penanganan stunting di Desa Antutan:

> *"...Sudah pasti anggaran ya, karena kalau ada anggaran program atau kegiatan yang kami lakukan*

dalam penanganan stunting ini pasti berjalan dan juga sudah pasti ada anggaran khusus stunting."
(Wawancara tanggal 25 Januari 2024)

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama dengan Ketua RT 07 yaitu Habel Usat:

"...Dari desa ada anggaran yang diberikan khusus dalam penanganan stunting ini, kalau tidak ada anggaran tidak mungkin kegiatan dari ibu- ibu posyandu berjalan."
(Wawancara tanggal 06 Februari 2024)

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris Posyandu Sesula yaitu Natalia:

"...Faktor pendukungnya itu ada bantuan anggaran dari desa khususnya untuk penanganan stunting ini contohnya kegiatan dari posyandu itu berjalan saja seperti kaya pembagian pmt lokal, bubur kacang hijau dari desa itu semua karena ada anggaran yang diberikan."
(Wawancara tanggal 31 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dukungan anggaran oleh Pemerintah Desa Antutan dapat menajdi faktor pendukung dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan, dengan dibuktikan adanya pembagian PMT Lokal oleh pemerintah desa, adanya pembagian biskuit di posyandu, dan juga adanya insentif untuk kader – kader kesehatan.

3) Kerja Sama Antar Lembaga Desa

Dalam penanganan stunting di desa sangat diperlukan adanya peran dari semua lembaga desa baik itu dari RT, maupun kader – kader kesehatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan secara efektif dan efisien karena lembaga desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah desa.

Sama halnya yang dilakukan oleh lembaga Desa Antutan, semua lembaga desa bekerja sama dan memiliki tugas dan fungsinya masing masing dalam penanganan stunting di Desa Antutan, Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Kasi Kesejahteraan yaitu Ajang Kuling mengenai faktor pendukung dalam penanganan stunting dides Aantuan:

> *"...Untuk faktor Pendukung nya itu dari semua kelembagaan desa misalnya dari KPM, posyandu nya, pemerintah desa nya yang berkoordinasi dan kerjasama dalam hal penanganan stunting di Desa Antutan yang dalam artian semua lembaga terlibat aktif."*
> *(Wawancara tanggal 23 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama dengan Ketua RT 11 yaitu Lukman, S. E:

> *"...Pendukungnya selain dari anggaran itu ada kerjasama antar lembaga desa dan adanya*

pembagian tugas dari setiap lembaga desa serta dari RT koordinasi ke warganya mengenai kebersihan lingkungan rumah."
(Wawancara tanggal 6 Februari 2024)

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Sekretris PKK yaitu Idha Lukman:

"...Faktor pendukungnya menurut saya itu antar lembaga desa saling bekerja sama dalam upaya penanganan stunting ini baik itu dari kader posyandu dari RT pokoknya semua nya terlibat dan saling kerjasama."
(Wawancara tanggal 23 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerja sama antar lembaga desa dan pemerintah Desa Antutan merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya peanganan stunting di Desa Antutan, baik itu dari Kader Pembangunan Manusia yang berjalan sesuai dengan fungsinya, kader – kader posyandu yang melaksanakan posyandu rutin di Desa Antutan, dengan itu sudah berjalan sesuai dengan fungsi nya, ketua RT sebagai penggerak masyarakat untuk gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sejalan dengan hal ini maka lembaga desa di Desa Antutan sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

b. Faktor Penghambat

1) Kesadaran Masyarakat

Dalam penanganan stunting di Desa Antutan yang menjadi menghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai permasalahan stunting yang dimana stunting ini berdampak terhadap kesehaatan dan perkembangan anak, Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada Sekretaris Desa Antutan yaitu Riyon Rikartu, ST mengenai faktor penghambat dalam penanganan stunting di Desa Antutan:

> *"...Penghambatnya yaitu kesadaran masyarakat untuk posyandu itu kurang misalnya posyandu ada 100 anak paling yang datang itu ada 60 an anak aja yang 40 ini dengan berbagai alasan tidak ikut posyandu, dan untuk upaya yang dilakukan adalah menyebarkan pamflet posyandu yang menarik, merehab posyandu dengan memberikan tema anak - anak agar anaknya senang posyandu."*
> *(Wawancara tanggal 24 Januari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama dengan Ketua Posyandu Panginbaya yaitu Linda:

> *"...Penghambat nya itu adalah orang tuanya yang tidak membawa anaknya posyandu dengan berbagai alasan misalnya sibuk berladang sibuk bekerja, namun itu tidak menjadikan kami untuk berhenti sampai disitu saja tapi upaya yang kami lakukan yaitu kami yang mendatangi rumahnya dan membawa anak nya dengan ijin orang tuanya agar anak tersebut dapat mengikuti posyandu."*
> *(Wawancara tanggal 25 Januari 2024)*

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Sekretaris Posyandu Sesula yaitu Natalia:

> *"...Faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat yang kurang karena mereka tidak ikut posyandu dan kalau pun ikut nanti setelah itu orang tua nya tidak lagi mengikuti apa yang kita anjurkan dan upaya dari kami adalah memberikan PMT dengan mengantarkan kepada anaknya agar bisa mengkonsumsi PMT."*
> *(Wawancara tanggal 31 Januari 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam upaya penanganan stunting ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting, masyarakat masih tidak peduli dengan pentingnya posyandu, ppentingnya PMT, pentingnya sosialisasi mengenai stunting, namun hambatan ini masih bisa di atasi oleh pemerintah desa dan kader – kader kesehatan di Desa Antutan, yaitu dengan berupaya membuat posyandu dengan tema yang menarik agar orang tua dari anak dapat dan juga anak dapat mengikuti kegiatan posyandu dengan suasana baru.

4.2.3. Tanggapan Masyarakat Mengenai Peran Pemerintah Desa Antutan Dalam Penanganan Stunting

Dalam menjalankan peran dalam penanganan stunting di Desa Antutan Pemerintah Desa Antutan tentunya memiliki responsive dari masyarakat mengenai apakah dalam kebijakan pemerintah desa dapat sesuai dengan kehidupan masyarakat atau sebaliknya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan adanya reponsive tentunya bisa meningkatkan lebih lagi terkait peran dari pemerintah desa dalam menjalankann dan membuat suatu kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti menanyakan langsung kepada masyarakat yaitu Merry mengenai bagaimana tanggapan masyarakat tentang peran pemerintah Desa Antutan dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan:

> *"...Tanggapan saya adalah sudah termasuk baik seperti penyuluhan atau informasi dari kader kader posyandu yang ada dan juga bidan yang ada disini, dari kita hamil mereka selalu mengingatkan kita untuk melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali dan posyandu nya juga rutin serta juga disini ada bkb jadi yang dibina itu kita sebagai orang tua dari anak tersebut, dan menurut saya sudah baik pemdes disini juga sudah mendukung program pencegahan stunting yang ada di Desa Antutan, dengan begitu bisa mengurangi anak stunting di Desa Antutan."*
> *(Wawancara tanggal 03 Februari 2024)*

Untuk mempertegas pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama dengan orang tua azora menita:

"...Tanggapan saya adalah baik karena dari segi informasi yang diberikan oleh pemerintah desa maupun dari posyandu itu tersampaikan semua, dan anak saya termasuk juga sering ikut posyandu dan anak saya juga mendapatkam PMT baik itu dari posyandu maupun dari puskesmas, setiap informasi mengenai jadwal posyandu itu sudah pasti di bagikan oleh kader posyandu sehari sebelum posyandu dan juga dari sosialisasinya juga sudah baik memberikan edukasi."

(Wawancara tanggal 03 Februari 2024)

Untuk mempertegas kedua pernyataan di atas, maka peneliti kembali menanyakan hal yang sama kepada Susi:

"...Tanggapan saya adalah baik, kalau sosialisasi yang diadakan pemdes diadakan kalau ada pertemuan diselipkan hal-hal penanganan stunting yang dilaksanakan di aula desa, dan juga pemdes ini sangat mendukung program stunting, kemarin sempat ada pertemuan yang menjadi kendala ini adalah sulitnya air bersih dan upaya yang dilakukan pemdes ini adalah bersikeras mengupayakan ke pdam untuk adanya air bersih dengan buktinya ada keran-keran yang sudah ada, cuma nanti diliat bagaimana kerjanya."

(Wawancara tanggal 7 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peran Pemerintah Desa Antutan dalam upaya penanganan stunting menurut masyarakat setempat sudah cukup baik, contohnya dari sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Antutan pembagian PMT kepada anak yang terdampak stunting, penyuluhan informasi dari kader – kader kesehatan dan pemerintah desa tersampaikan ke masyarakat, dan juga segala

upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengadakan air bersih untuk masyarakat dengan dibuktikan adanya keran yang dipasang dirumah rumah warga.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan

Dalam penanganan stunting di desa peran pemerintah desa yang sangat di perlukan untuk membuat dan melaksanakan suatu kebijakan yang tepat dalam masalah ini, pemerintah desa juga harus memerhatikan situasi dan kondisi masyarakatnya karena masalah ini menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak. Peran pemerintah desa yang dimaksud secara rinci telah ditetapkan pada Peraturan Bupati (PERBUP) No. 13 Tahun 2020 di ubah dengan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan Stunting menyatakan bahwa Menetapkan priotitas perencanaan pembangunan desa dan alokasi pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa terkait upaya pencegahan stunting, pemerintah desa mengoptimalkan peran kelembagaan desa melalui pos pelayanan terpadu, pendidikan anak usia dini, pembinaan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia (KPM) di desa sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (3) personil Kader Desa dari Kader Posyandu/Kader PAUD/ Kader Kesehatan atau lainnya yang telah mendapatkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan ditugaskan dalam upaya pencegahan stunting di Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait upaya pencegahan stunting kepada masyarakat, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan upaya pencegahan stunting dan perbaikan gizi dapat melakukan koordinasi bersama tim Teknis Pencegahan Stunting Kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sejalan dengan hal itu peran Pemerintah Desa Antutan dalam hal upaya penanganan stunting di Desa Antutan sebagai berikut:

a. Menetapkan Priotitas Perencanaan Pembangunan Desa Dan Alokasi Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terkait Upaya Pencegahan Stunting

Menetapkan prioritas dalam perencanaan pembangunan desa dan alokasi pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang terkait dengan pencegahan stunting merupakan sebuah strategi penting dalam pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan nutrisi penduduk desa, khususnya anak-anak. Menentukan skala prioritas juga melalui beberapa tahapan seperti identifikasi permasahalan yang ada di desa, analisis stakholder atau siapa saja yang akan berpengaruh pada program, penilaian sumber daya meluputi pengalokasian

anggaran, tenaga kerja dan bahan, konsultasi publik berarti musyawarah dengan masyarakat, pengambilan keputusan yang sejalan dengan visi dan misi, penyusunan program yang akan dilaksanakan, lalu evaluasi pelaksanaan program berkala. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai mursenbang desa yang dimana dari musrenbang desa terdapat RPJMDES yang disusun dan dijalankan. Sejalan dengan itu pemerintah Desa Antutan juga menjadikan pencegahan stunting sebagai skala prioritas di desa. Sistem desa terdapat detail – detail mengenai pencegahan stunting, seperti bidang pembangunan yang mengurusi infrastruktur lembaga yang ada di desa seperti merehab posyandu, dibidang pembinaan memberikan edukasi dan juga pembinaan kepada kader-kader posyandu, bidang pemberdayaan memberikan edukasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai pola asuh anak yang baik, dan adanya anggaran terkait alat kesehatan dari masing-masing posyandu. Dengan demikian pencegahan stunting ini juga menjadi skala prioritas di Desa Antutan setelah pembangunan.

b. Mengoptimalkan Kelembagaan Desa

Lembaga desa adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab dalan kehidupan bermasyarakat di lingkungan desa. Dalam hal penanganan stunting di desa peran kelembagaan desa yang sangat

diperlukan, untuk itu pemerintah desa harus mengoptimalkan peran kelembagaan desa untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas lembaga desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing – masing. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, mengoptimalkan peran kelembagaan desa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam menentukan apakah masing- masing lembaga desa berjalan sesuai tugas dan fungsinya, dengan demikian Pemerintah Desa Antutan mengoptimalkan peran kelembagaan Desa Antutan melalui penyuluhan dan pembinaan kepada kader – kader kesehatan dalam hal penanganan stunting berupa rembug stunting yang dimana membahas tentang pengoptimalan stunting dan penurunan stunting. Pembinaan dan penyuluhan kepada kader bertujuan untuk meningkatkan kapastitas dalam menangani stunting sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan status gizi pada anak dan ibu hamil di Desa Antutan.

c. Memberikan Dukungan Mobilisasi dan Penyediaan Insentif Kepada Kader

Dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif adalah dua strategi yang digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas dalam program, dukungan mobilisasi memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia serta penyediaan insettif secara langsung mempengaruhi motivasi

pihak yang terlibat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif sangat penting dalam berbagai program salah satunya penanganan stunting agar program dapat berjalan dengan baik, dengan demikian Pemerintah Desa Antutan juga memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif untuk lembaga desa yang berperan dalam hal penanganan stunting, dukungan mobilisasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Antutan berupa peningkatan kapasitas lembaga desa dan peningkatan kesadaran melalui kegiatan rembug stunting yang diadakan setahun sekali agar lembaga desa mengetahui peran dari masing – masing lembaga desa dalam hal penanganan stunting di Desa Antutan, selain itu pemerintah desa juga memberikan insentif untuk lembaga desa yang dana nya berasal dari APBD dengan tujuan adanya partisipasi dan kontribusi dari lembaga desa untuk masyarakat yang ada di Desa Antutan dalam penanganan stunting.

Berikut dana insentif yang diberikan oleh Pemerintah Desa Antutan kepada lembaga desa :

1) Bina Keluarga Balita (BKB) : Rp. 5.400.000,-
2) Posyandu : Rp. 5.400.000,-
3) Kader Pembangunan Manusia : Rp. 3.600.000,-
4) Ketua RT : Rp. 1.000.000,-

d. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan suatu proses penyebaran informasi, pengetahuan, atau pun kesadaran mengenai suatu isu, program, atau kebijakan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi aktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan stunting kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena dari kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab, dampak maupun pencegahan stunting, dapat memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai gizi yang baik untuk anak dan ibu hamil, demikian sejalan dengan hal itu pemerintah Desa Antutan juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kader –kader kesehatan maupun dari koordinasi bersama puskesmas mengenai masalah stunting yang biasanya dilaksanakan dalam setiap pertemuan, contohnya mengenai penyebab, dampak, dan langkah – langkah pencegahannya, maupun pengoptimalan dan penurunan stunting.

Tetapi tidak hanya kegiatan sosialisasi yang diadakan dalam penanganan stunting, pemerintah desa juga membagikan PMT lokal kepada anak yang terkena dampak stunting sampai dimana BB dan TB anak itu sesuai dengan standar umurnya melalui masing – masing posyandu baik itu posyandu panginbaya, sesula, masbah maupun tunas baru, posyandu juga mengadakan

posyandu rutin yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali yang dimana pertumbuhan dan perkembangan anak akan di lihat, selain dari itu pemerintah desa dan posyandu juga memberikan biskuit dan vitamin A yang diberikan di setiap bulan maret dan agustus.

e. Koordinasi Bersama Tim Teknis Pencegahan Stunting Kabupaten, Daerah Maupun Puskesmas

Koordinasi dalam penanganan stunting merujuk pada suatu kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, instansti terkait dan puskesmas desa, koordinasi ini sangat diperlukan karena penanganan stunting membutuhkan pendekatan multidisiplin dan multisektor mencakup aspek nutrisi dan kesehatan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan stunting di desa koordinasi bersama instansi dan puskesmas sangat penting karena dengan adanya koordinasi dapat meningkatkan efektivitas intervensi dalam penanganan stunting, dengan demikian pemerintah Desa Antutan turut berkoordinasi bersama puskesmas di Desa Antutan dan tentunya juga berkoordinasi bersama dinas kesehatan melalui jalur komunikasi puskesmas, kontribusi yang diberikan oleh puskesmas di Desa Antutan adalah adanya pembinaan kepada kader – kader kesehatan mengenai stunting, dan juga puskesmas juga memberikan PMT kepada anak yang terdampak stunting, namun tidak hanya itu kontribusi lain dari puskesmas adalah pusekesmas

juga turut turun lapangan untuk mendata seberapa banyak anak yang terkena dampak stunting di Desa Antutan, puskesmas juga memberikan bimbingan konseling kepada orang tua mengenai perilaku hidup bersih dan sehat didalam lingkungan rumah.

4.3.2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Penanganan Stunting Desa Antutan

a. Faktor Pendukung

1) Koordinasi

Dalam penanganan stunting di Desa Antutan ditemukan faktor pendukung yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan yaitu adanya koordinasi bersama puskesmas, dengan adanya koordinasi bersama puskesmas Desa Antutan mampu untuk membantu pemerintah desa maupun lembaga desa dalam melaksanakan suatu program intervensi gizi untuk anak dan ibu hamil, pusekesmas juga ikut serta dalam mendata jumlah anak terdampak stunting di Desa Antutan dan juga dengan berkoordinasi bersama puskesmas mampu memberikan suatu pembinaan mengenai penanganan dan pencegahan stunting di Desa Antutan, puskesmas juiga memberikan bimbingan konseling kepada orang tua mengenai pola asuh anak yang benar serta adanya

penyuluhan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah.

Puseksmas pun juga sudah semestinya berkoordinasi dengan dinas kesehatan, artinya puskesmas adalah perpanjangan tangan dari dinas kesehatan. Dengan demikian pemerintah desa merasa terbantu dengan adanya koordinasi dengan puskesmas Desa Antutan serta dari dinas kesehatan.

2) Dukungan Anggaran

Dalam penanganan stunting di Desa Antutan juga diteumkan faktor pendukung yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan yaitu dukungan anggaran dari pemerintah desa dalam menjalankan suatu kebijakan dalam penanganan stunting, salah satunya adalah dukungan anggaran untuk pemberian PMT lokal, pembagian biskuit kepada anak yang dilaksanakan saat posyandu maupun dibagikan secara langsung.

Dukungan anggaran tidak hanya berupa pangan tetapi juga berupa insentif kepada lembaga desa yang terlibat dalam penanganan stunting, sehingga dengan adanya dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Desa Antutan

dapat mendukung kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan stunting di Desa Antutan.

3) Kerjasama Antar Lembaga Desa

Dalam penanganan stunting di Desa Antutan juga ditemukan faktor pendukung yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan yaitu adanya kerjasama antar lembaga desa dalam menjalankan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting di Desa Antutan, lembaga desa yang dimaksud adalah dari kader-kader posyandu, dari kader pembangunan manusia dan juga RT. Dibuktikan dengan adanya posyandu rutin yang dilaksanakan oleh masing – masing posyandu, dimana dengan adanya posyandu rutin maka pertumbuhan dan perkembangan anak bisa dilihat, posyandu juga melakukan kegiatan pembagian PMT LOKAL dari pemerintah desa maupun PMT dari pusksesmas, dan juga adanya pembagian vitamin A setiap bulan Maret dan Agustus.

RT juga terlibat dalam hal ini tentunya dengan menghimbau masyarakat untuk gotong royong yang sering dilaksanakan dilingkup RT agar lingkungan tetao terjaga karena pola hidup bersih dan sehat juga termasuk pencegahan stunting, serta RT juga ikut berpartisipasi

dalam kegiatan sosilisasi yang diadakan oleh pemerintah desa kemudian informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat dilingkup RT.

b. Faktor Penghambat

1) Kesadaran Masyarakat

Dalam penanganan stunting di Desa Antutan juga ditemukan faktor penghambat yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami dampak fatal akibat stunting, contoh dari kurangnya kesadaran masyarakat di desa adalah tidak mengikuti posyandu rutin dengan alasan sibuk dan tidak mengikuti saran yang diberikan oleh kader kader posyandu mengenai pola hidup bersih dan sehat serta dari pola makan yang bergizi. Meskipun adanya faktor penghambat ini namun tidak menurunkan semangat pemerintah desa dan lembaga desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan, dari faktor penghambat tersebut upaya yang dilakukan dari pemerintah desa adalah dengan selalu memberikan informasi mengenai posyandu rutin dengan pamflet semenarik mungkin dan membuat posyandu dengan tema anak – anak dengan harapan dapat menarik simpati dari masyarakat agar bisa mengikuti posyandu, selain dari

itu upaya yang dilakukan oleh kader posyandu adalah dengan menjemput anak yang orang tua nya sibuk dengan seijin orang tua anak tersebut agar dapat mengikuti kegiatan posyandu.

Jadi, berdasarkan indikator-indikator dan faktor pendukung dan penghambat di atas mengenai peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Antutan menurut masyarakat sudah cukup baik karena Pemerintah Desa Antutan mendukung program dalam penanganan stunting di Desa Antutan, selain itu pemerintah desa juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan adanya kerja sama dari lembaga desa yang membuat kegiatan – kegiatan penanganan stuntin di Desa Antutan dapat berjalan dengan baik, serta koordinasi yang baik antara pemerintah desa, lembaga desa dan puskesmas dalam penanganan stunting di desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan melalui indikator mengoptimalkan kelembagaan desa, dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, dan koordinasi bersama tim teknis pecegahan stunting daerah maupun puskesmas
b. Mengoptimalkan kelembagaan desa, dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, dan koordinasi bersama tim teknis pecegahan stunting daerah maupun puskesmas dapa dikatan sudah baik, dimana peran pemerintah Desa Antutan sudah sesuai dengan indikator dan sangat mendukung kegiatan – kegiatan penanganan stunting
c. Dalam penanganan stunting pemerintah Desa Antutan mengoptimalkan peran kelembgaan desa dengan memberikan pembinaan kepada lembaga desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas lembaga desa,

karena lembaga desa juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah desa.

d. Dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif sudah disiapkan oleh pemerintah Desa Antutan, dukungan mobilisasi berupa peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan pembinaan mengenai penanganan stunting, lalu adanya insentif dari masing–masing lembaga desa yang terlibat dalam penanganan stunting dengan tujuan sebagai motivasi dan dorongan kepada lembaga desa.
e. Bersosialisasi kepada masyarakat menegnai penanganan stunting dilakukan oleh pemerintah desa dengan harapan adanya penurunan angka stunting di Desa Antutan, selain itu juga memberikan PMT lokal dan bikuit seerta vitaimin A. Dengan mendukung peranan pemerintah desa dalam kasus ini, masyarakat juga turut serta mengikuti kegiatan posyandu rutin yang diadakan oleh masing – masing posyandu dengan tujuan melihat perkembangan dan pertumbuhan anak dan ibu hamil
f. Koordinasi bersama puskesmas tentu saja sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Antutan, puskesmas memberikan kontribusi berupa pembinaan dan turut serta dalam mendata jumlak stunting di Desa Antutan, selain itu puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari dinas kesehatan dimana puskesmas juga memberikan PMT kepada aank yang terdampak stunting dan memberikan bimbingan konseling kepada orang tua mengenai pola hidup berish dan sehat dan pola asuh anak yang benar.

g. Dari hasil penelitian dalam menajalankan peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Antutan ada beberapa hal yang mendukung seperti adanya koordinasi antara pemerintah desa dan puskesmas, adanya dukungan anggaran yang diberikan pemerintah desa berupa dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan penanganan stuntung, serta adanya kerja sama antar pemerintah desa dengan lembaga desa dalam penanganan stunting di Desa Antutan. Selain itu terdapat hal yang menghambat seperti kurangnya kesadaraan masyarakat mengenai dampak dan penyebab dari stunting, dari sebagian masyarakat masih tak acuh dengan penting nya posyandu, meskipun terdapat hambatan upaya yang dilakukan oleh pemrintah desa dan kader posyandu adalah dengan memberikan informasi jadwal posyandu dengan famflet semenarik mungkin dan membuat posyandu degan tema anak – anak serta menjemput anak yang akan posyandu dikala orang tua nya sibuk dan tentunya dengan seijin orang tuanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran yang nantinya berguna demi meningkatkan peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di desa, terkhususnya di Desa Antutan, yaitu :

a. Diharapkan pemerintah Desa Antutan dapat melakukan kunjungan ke setiap posyandu di Desa Antutan paling tidak setiap 3 bulan sekali agar pemerintah desa juga mengetahui tentang perkembangan bayi balita

yang ada di desa sehingga dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para kader kesehatan tepat sasaran.

b. Pemerintah Desa Antutan dapat berupaya dalam meningkatkan lagi kesadaran masyarakat agar masyarakat dapat tertarik dan dapat berpartisipasi dalam setiap sosialisasi mengenai dampak stunting, penyebab stunting, dan pencegahannya maupun ikut serta dalam kegiatan posyandu mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak.
c. Pemerintah Daerah (dinas kesehatan) dapat meningkatkan lagi upaya – upaya penanganan stunting di Desa Antutan melalui pusat kesehatan masyarakat di Desa Antutan agar dapat mewujudkan Desa Antutan menjadi zero stunting.
d. Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Antutan dapat berupaya lebih lagi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan stunting di Desa Antutan
e. Diharapkan masyarakat dapat peduli dan peka terhadap kegiatan – kegiatan di desa mengenai upaya penanganan stunting agar dapat membantu mengurangi angka stunting di Desa Antutan seperti mengikuti kegiatan posyandu rutin tiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mansyur, A. (2020). "*Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulatif dan Aplikatif*" Vol 9, (hlm. 27), Jatinangor: S.IP, M.Si Kuncoro G. Pambayun, diakses pada 24 Oktober pukul 19.00 wita.

Saadah, N., & Kp, S. (2020). *"Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting"*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 21.45 wita.

Sugiyono. (2018). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D/Sugiyono"*, Bandung: Alfabeta, diakses pada 28 November 2023 pukul 21.21 wita

Jurnal

Cohen, J, B., (1992). "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta: Rineke Cipta, Awaludin, F., Ramdani, R., (2022), dalam Jurnal Wahana Pendidikan (2022), Vol. 8, No. 1, diakses pada 24 Oktober pukul 21.12 wita.

Noufal, M. F. (2023). *"Peran kepemimpinan Ketua Yayasan dalam meningkatkan kinerja pegawai: Studi deskriptif Yayasan Al-Falah-Sukakarya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung",* Sunan Gunung Djati Bandung: Moch Faris Noufal., https://digilib.uinsgd.ac.id/79793/, diakses pada 24 Oktober pukul 20.25 wita.

Prayudi., Made Arista., dkk. (2018). "Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449-, diakses pada 22 Juni 2023 pukul 19.45 wita.

Skripsi

Hasyim, T. A. (2023). *"Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Menurut Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah"*, https://repository.radenintan.ac.id/view/subjects/SY.html, diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 15.40 wita

Illahi, N. H. (2023). *"Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Stunting Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara"*, https://eprints.ipdn.ac.id/15610/, diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 16.20 wita

Juliyanti, E. K. (2022). *"Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat",* https://repo.apmd.ac.id/2056/#, diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 17.00 wita.

Website

Bappenas. 2020. *"Cegah Stunting Itu Penting"* https://cegahstunting.id/kategori/pemerintah/pemerintah-daerah/, diakses pada 23 Juni pukul 21.05 wita.

Diskominfo. 2023. *"Kolaborasi Bersama, Intervensi Penurunan Stunting Harus Terintegrasi",* https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/kolaborasi-bersama-intervensi-penurunan-stunting- harus-terintegrasi, diakses pada 22 November 2023 pukul 20.23 wita.

Unicef. 2020. *"Situasi Anak di Indonesia-Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak",* https://www.unicef.org, diakses pada 23 Juni 2023 pukul 23.05.

Yonavilbia, Eka. 2023. *"Tekan Angka Stunting 2023, Pemkab Bulungan Lakukan Analisis Situasi",* https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/705700/tekan-angka-stunting-2023-pemkab-bulungan-lakukan-analisis-situasi?s, diakses pada 23 Juni pukul 19.40 wita.

Dokumen Hukum atau Dokumen Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* LN.2014/No. 7, TLN No. 5495. Pemerintah Pusat. Jakarta, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014, diakses pada 22 Juni 2023 pukul 20.03 wita.

Indonesia. *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. LN.2021/No.172. Pemerintah Pusat. Jakarta, https://disperin.ntbprov.go.id/?p=9642, diakses pada 22 Juni 2023 pukul 20.35 wita.

Kabupaten Bulungan. 2020. *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Stunting*. BD 2020/NOMOR 13. Pemerintah Kabupaten Bulungan. Tanjung Selor, https://peraturan.bpk.go.id/Details/140569/perbup-kab-bulungan-no-13-tahun-2020, diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 19.45 wita.

SURAT IZIN PENELITIAN

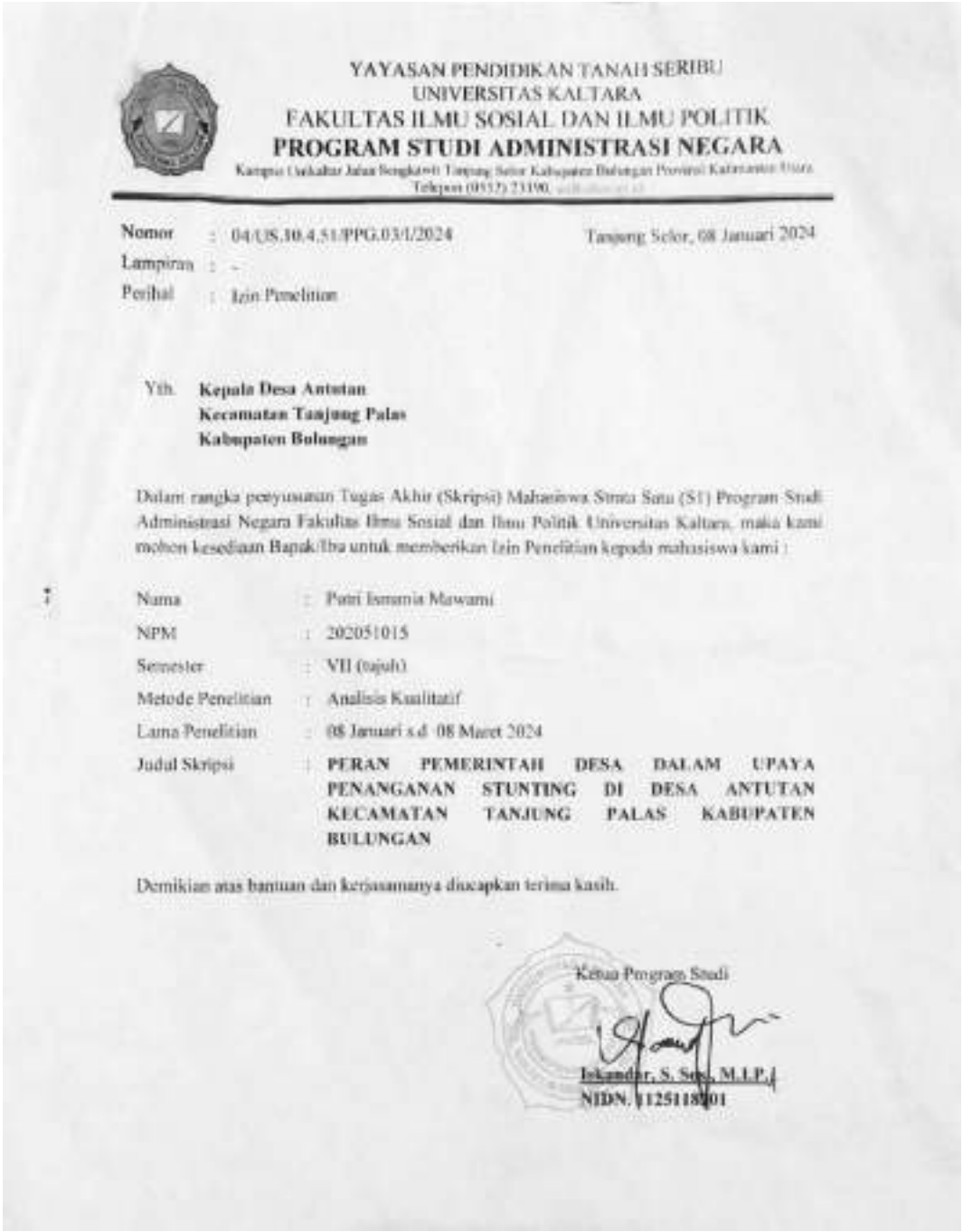

YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190,

Nomor : 04/US.10.4.51/PPG.03/I/2024 Tanjung Selor, 08 Januari 2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Kepala Desa Antutan**
Kecamatan Tanjung Palas
Kabupaten Bulungan

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama	:	Putri Ismania Mawami
NPM	:	202051015
Semester	:	VII (tujuh)
Metode Penelitian	:	Analisis Kualitatif
Lama Penelitian	:	08 Januari s.d 08 Maret 2024
Judul Skripsi	:	**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA ANTUTAN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

Iskandar, S. Sos., M.I.P.,
NIDN. 1125118201

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN TANJUNG PALAS
DESA ANTUTAN

Kode Desa : 63.01.01.2007 Alamat : Jl. Taman Siswa RT. 09 RW. 02 Desa Antutan Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan

Antutan, 20 Januari 2024

Nomor : 005 /2007/DS-AT/I/2024
Lamp : -
Perihal : Tanggapan Izin Penelitian

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POITIK
UNIVERSITAS KALTARA
Cq. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik
Di -
Tanjung Selor

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari kampus Nomor : 04/US.10.4.5/PPG.03/I/2024 tentang izin Penelitian atas mahasiswa yang bernama Putri Ismania Mawarni (NPM. 2020510135), dengan judul penelitian ***"Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan"*** maka bersama ini kami sampaikan pada intinya kami memberi izin dan menyambut baik, serta siap untuk mendukung penelitian yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
a.n. Kepala Desa Antutan,
Sekdes

RIYON RIKARTU, ST

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
KECAMATAN TANJUNG PALAS
DESA ANTUTAN

Kode Desa : 65.01.01.2007 Alamat : Jl. Tanon Siwo RT.08 RW.02 Desa Antutan Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 009/005/Sket/DS-BTN/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: Riyon Rikartu, ST
Jabatan	: Sekretaris Desa Antutan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

N a m a	: Putri Ismania Mawarni
NPM	: 202051015
Alamat	: Jl. Puran Buloh Perindu
Pekerjaan	: Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Administrasi Negara

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Antutan selama 2 bulan terhitung mulai tanggal 08 Januari s/d 08 Maret 2024 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan**".

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Antutan, 28 Februari 2024

Mengetahui,
An. Kepala Desa Antutan
Sekdes

RIYON RIKARTU, ST

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Pemerintah Desa Antutan)

1. Apakah pemerintah desa menetapkan stunting menjadi skala prioritas?
   a. Terdapat pada urutan keberapa pencegahan stunting ini ?
   b. Bagaimana pemerintah desa menetapkan stunting sebagai suatu program prioritas?
2. Lembaga desa apa saja yang terlibat dalam penanganan stunting di Desa Antutan?
   a. Bagaimana Pemerintah Desa mengoptimalkan kelembagaan Desa dalam upaya penanganan stunting di Desa Antutan?
3. Apakah Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif untuk lembaga desa?
   a. Berapa insentif perbulan yang diberikan pada lembaga desa?
   b. Dana insentif berasal darimana dan siapa yang memberikan?
4. Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya penanganan stunting di desa Antuan?
   a. Kegiatan sosialisasi stunting dilaksanakan berapa bulan sekali?
5. Bagaimana Pemerintah Desa melakukan koordinasi terkait pencegahan stunting kepada tim teknis pencegahan stunting Kabupaten, Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat?
   a. Apa kontribusi yang diberikan dari Kabupaten, Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penaanganan stunting di desa Antutan?
6. Apa faktor pendukung dalam upaya penanganan stunting di desa Antutan?
7. Apa faktor penghambat dalam upaya penanganan stunting di desa Antutan?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Lembaga Desa Antutan: KPM, Posyandu, BKB, Ketua Adat, RT)

1. Lembaga desa apa saja yang terlibat dalam penanganan stunting di desa Antutan?
   b. Bagaimana Pemerintah Desa mengoptimalkan kelembagaan Desa dalam upaya penanganan stunting di desa Antutan?
2. Apakah Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif untuk lembaga desa?
   c. Berapa insentif perbulan yang diberikan pada lembaga desa?
   d. Dana insentif berasal darimana dan siapa yang memberikan?
3. Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya penanganan stunting di desa Antuan?
   b. Kegiatan sosialisasi stunting dilaksanakan berapa kali?
   c. Apakah posyandu rutin mengadakan kegiatan posyandu? Berapa kali melaksanakannya?
   d. Bagaimana peranan RT di lingkungan nya dalam penanganan stunting?
4. Bagaimana Pemerintah Desa melakukan koordinasi terkait pencegahan stunting kepada tim teknis pencegahan stunting Kabupaten, Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat?
   b. Apa kontribusi yang diberikan dari Kabupaten, Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penaanganan stunting di desa Antutan?
5. Apa faktor pendukung dalam upaya penanganan stunting di desa Antutan?
6. Apa faktor penghambat dalam upaya penanganan stunting di desa Antutan?

PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Masyarakat)

1. Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya penanganan stunting di desa Antuan?
   a. Kegiatan sosialisasi stunting dilaksanakan berapa kali?
   b. Apa saja yang diberikan oleh pemerintah desa dalam penanganan stunting di desa Antutan?
2. Apakah sering mengikuti kegiatan posyandu di Desa Antutan?
   a. Lalu apa yang diberikan oleh kader kader posyandu saat posyandu?
   b. Berapa kali melaksanakan posyandu?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait peran Pemerintah Desa dalam upaya penanganan stunting di desa Antutan?
   a. Menurut saudara/i apakah sudah cukup baik atau kurang baik? Alasannya?

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Memperoleh Data Stunting Di Desa Antutan Bersama Sekretaris Desa Antutan
(Pada Tanggal 20 Juni 2023)

Memberikan Surat Ijin Penelitan Di Kantor Desa Antutan
(Pada Tanggal 08 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Ujang Kuling selaku Kasi Kesejahteraan Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 23 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Riyon Rikartu, ST selaku Sekretaris Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Aminudin Ak selaku Kepala Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 22 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Idha Lukman selaku Sekretaris PKK Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 23 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Marethariana selaku Ketua Posyandu Masbah Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 25 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Mardiana selaku Ketua Posyandu Tunas Baru Desa Antutan
(wawancara Pada Tanggal 25 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Muhammad Dwi, S. Gz selaku Ahli Gizi Puskesmas Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 29 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Linda selaku Ketua Posyandu Panginbaya Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 25 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Nurlaili selaku Ketua BKB Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Risnawati selaku Masyarakat Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 30 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Muhammad Wahyu selaku Masyarakat Desa Antutan
(Wawancara Pada Tangggal 3 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Natalia selaku Sekretaris Posyandu Sesula Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 31 Januari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Merry selaku Masyarakat Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 03 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Rini Larin selaku Masyarakat Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 03 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Habel Usat selaku Ketua Rt 07 Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 06 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Baderun selaku Ketua Rt 10 Dea Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 06 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak Lukman, S. E selaku Ketua Rt 11 Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 06 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Bapak H. Baharudin selaku Ketua Adat Bulungan
Dusun III Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 06 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Susi selaku Masyarakat Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 08 Februari 2024)

Proses Wawancara dengan Ibu Johar selaku Ketua KPM Desa Antutan
(Wawancara Pada Tanggal 08 Februari 2024)